

**ANALISIS PENGARUH INVESTASI SWASTA
TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI JAWA TIMUR 1996 SAMPAI DENGAN 2006
SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



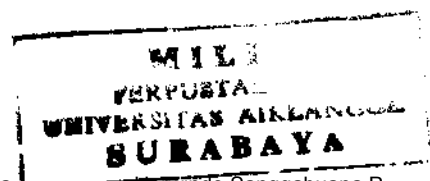
C. 67/08
Her
a

DIAJUKAN OLEH :

HERWINDO SANGGABUANA P.

No. Pokok : 040016904

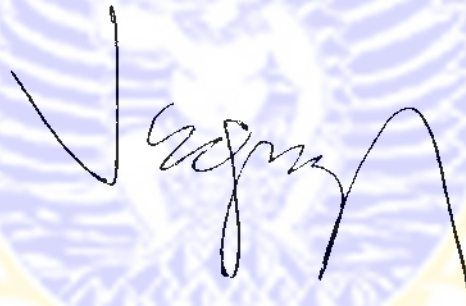
**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**



Surabaya, *28 - 1 - 2008*

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. SOEDJONO ABIPRAJA, SE.

SKRIPSI

ANALISIS INVESTASI SWASTA
TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI JAWA TIMUR 1996 SAMPAI DENGAN 2006

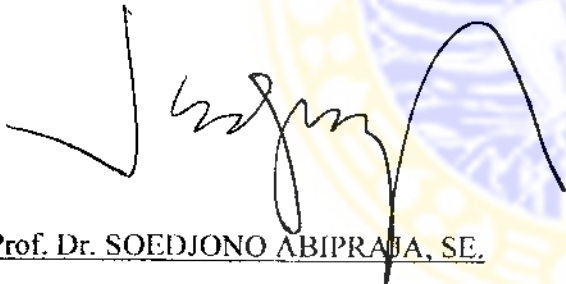
DIAJUKAN OLEH :

HERWINDO SANGGABUANA P.

No. Pokok : 040016904

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Prof. Dr. SOEDJONO ABIPRAJA, SE.

TANGGAL.....7-4-2008

KETUA DEPARTMEN ILMU EKONOMI,



Drs. Ec. TRI HARYANTO, M.P.

TANGGAL.....7/4/08

KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan persyaratan lulus menjadi sarjana S-1. Terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan penelitian / skripsi ini, diantaranya :

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan rejeki, rahmat, karunia, hidayah, anugrah yang sangat besar kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tua dan keluarga besar yang telah membantu, mendoakan, memberi semangat serta segala pengorbanan kepada penulis selama ini.
3. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE. Terima kasih atas perhatian, kritik, saran, nasehat dan bantuan dalam mengerjakan dan mempercepat penulisan skripsi
4. Dekan Fakultas Ekonomi: Drs.Ec.H. Karjadi Mintaroem,MSi
5. Mantan Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan: DR..Hj.Sri Kusreni, Dra.Ec MSi dan Mantan Sekretaris Jurusan: Dra.Ec.Hj. Siti Umajah Masjkuri; atas segala bimbingan, didikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah di FE UNAIR.
6. Ketua Departmen Ilmu Ekonomi : Drs. Tri Haryanto., MP dan Sekretaris Departmen Ilmu Ekonomi : Dra. Ec. Hj. Dyah Wulansari., M. Ec. Dev atas segala bimbingan, didikan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama kuliah di FE UNAIR.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga atas segala didikan dan bimbingan selama menuntut ilmu di FE UNAIR.

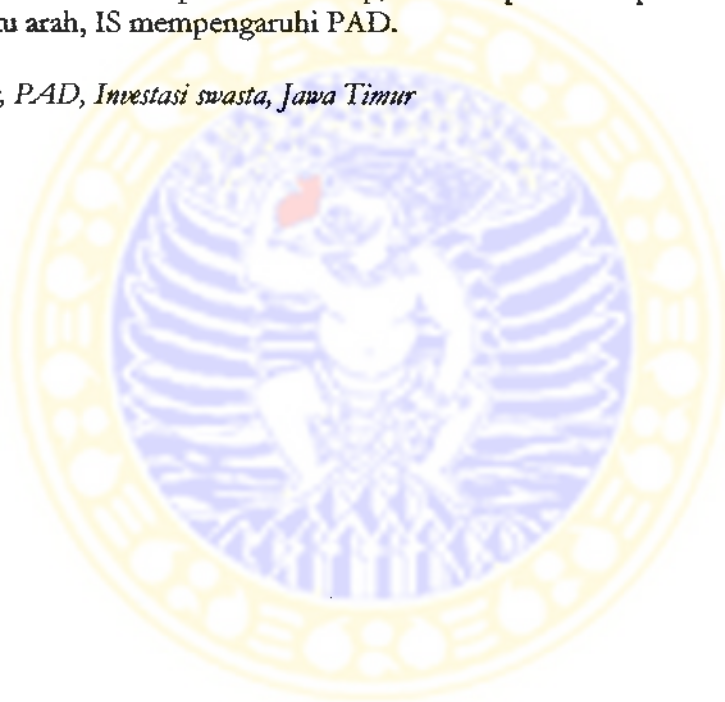
8. Teman-teman Ekonomi Pembangunan, jurusan lain, teman teman kantor, dll yang telah membantu penulis selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam situasi apapun, kapanpun dan dimanapun, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.



ABSTRAK

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai peran yang penting dalam kemandirian pembangunan serta keuangan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah harus menyediakan infra struktur guna menyerap investasi swasta. Harrod dan Domar menyatakan bahwa investasi swasta mempunyai peran ganda dalam peningkatan kapasitas produksi berikut pendapatan. Fenomena tersebut berusaha diamati dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan antara PAD dan Investasi Daerah (IS) dengan mengadopsi model kausalitas dalam data panel yang dikemukakan oleh Filer (1999). Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa secara keseluruhan terjadi pola kausalitas dua arah antara PAD dengan IS, kondisi ini hampir berlaku pada hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali di Kabupaten Sumenep, dimana pada kabupaten tersebut hanya terjadi hubungan satu arah, IS mempengaruhi PAD.

Kata kunci: Kausalitas, PAD, Investasi swasta, Jawa Timur



ABSTRACT

Regional income has important effect in both financial and regional development. So, regional government (*Kabupaten* or *Kota*) should provide sufficient infra structure to promote growth in regional income. Theoretically, Harrod and Domar explain that private investment has double effect for production capacity, either with regional income. Objective of this research is to analyses relationship pattern between regional income and private investment. Analytical tool for that hypothesis is adopting Filler's (1999) model for causality in panel data. Results indicate that *Jawa Timur* (overall) has bidirectional effect between private investments and regional income, except for *Kabupaten Sumenep* that has one way directional effect from private investment to regional income.

Key word(s): Causality, Regional Income, Private Investment, East Java



DAFTAR ISI

		Halaman
	KATA PENGANTAR	iii
	ABSTRAK	v
	ABSTRACTS	vi
	DAFTAR ISI	vii
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	7
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Manfaat Penelitian	8
	1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	10
	2.1. Landasan Teori	10
	2.1.1. Teori Investasi Swasta	10
	2.1.2. Teori Spasial dan Konsep Anggaran	12
	2.1.3. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	19
	2.1.3.1. Definisi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	19
	2.1.3.2. Teori Perubahan Struktural dan Pola Pembangunan	22
	2.1.4. Teori Harrod Domar	24
	2.2. Penelitian Sebelumnya	27
	2.3. Model dan Hipotesis Penelitian	31
BAB 3	METODE PENELITIAN	32
	3.1. Pendekatan Penelitian	32
	3.2. Identifikasi Variabel	32
	3.3. Definisi Operasional	32
	3.4. Jenis dan Sumber Data	33
	3.5. Prosedur Pengumpulan Data	33
	3.6. Teknik Analisis	34
	3.6.1. Pembagian <i>Quadrant</i>	35
	3.6.2. Uji Kausalitas	36
	3.6.3. Penetapan <i>Lag</i> Optimal	39
	3.6.4. Uji F	40
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
	4.1. Gambaran Umum dan Variabel Penelitian	41
	4.2. Pembahasan	52

BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN	69
	5.1. Simpulan	69
	5.2. Saran	71
	LAMPIRAN	
	DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur, Pertumbuhan Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah (Dalam Ribu Rupiah) 5
Tabel 4.1	Pembagian Kawasan (<i>Quadrant</i>) Kabupaten/Kota di Jawa Timur 47
Tabel 4.2	Hasil Pengujian <i>Lag</i> 48
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Kausalitas 50
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Hipotesis 51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Investasi Swasta di Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2004	6
Gambar 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2005	39
Gambar 4.2 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	41
Gambar 4.3 Pertumbuhan Investasi Swasta Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2005	43
Gambar 4.4 Rata-Rata Pertumbuhan Investasi Swasta Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	48
Gambar 4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) <i>Quadrant</i> I Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	57
Gambar 4.6 Investasi Swasta <i>Quadrant</i> I Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	58
Gambar 4.7 Pendapatan Asli Daerah (PAD) <i>Quadrant</i> II Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	60
Gambar 4.8 Investasi Swasta <i>Quadrant</i> II Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	61
Gambar 4.9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi Swasta <i>Quadrant</i> IV Tahun 1996 Sampai Dengan 2006	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara merupakan lembaga (organisasi) kemasyarakatan dengan wilayah dan pemerintahan yang berkuasa dengan didukung oleh warganya guna mencapai tujuan tertentu (Sekretariat Jenderal BPK, 1998: 7). Salah satu kebijakan yang cukup penting dan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia adalah membuat RAPBN dan menetapkan sebagai APBN, di mana APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR (UU No 33 tahun 2004).

Pemerintah negara memiliki berbagai kegiatan seperti pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, pekerjaan umum, perekonomian dan sebagainya untuk memenuhi atau meningkatkan kesejahteraan warganya, begitu juga dengan pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah provinsi untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya.

Penyelenggaraan otonomi daerah berawal dari pergantian pemerintahan Orde Baru menuju Orde Reformasi, dan kemudian menjadi Orde Otonomi Daerah. Pada zaman Orde Baru, pelaksanaan perencanaan pembangunan yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan kreativitas

daerah, karena kurangnya kepercayaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri, tidak disertai dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dan pembiayaan infrastruktur yang kurang memadai, sehingga malah terjadi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pergeseran sistem pemerintahan juga dikarenakan adanya krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1997 sampai 1999, yang tampak pada ketidakberhasilan upaya pemerintah mengangkat perekonomian dan dampak implikasi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial budaya. Dengan adanya krisis multi dimensional tersebut sehingga timbulnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai kerakyatan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah; yang kesemuanya itu ditujukan kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Pemerintah (baik itu pusat maupun daerah) berusaha memperoleh penerimaan/pendapatan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk peran pemerintah daerah secara riil, di mana jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam pembiayaan dan kemandirian pembangunan dan keuangan daerah.

Upaya tindak lanjut pemerintah daerah di antaranya adalah dengan memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi, yang nantinya dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan PAD. Maka investasi merupakan salah satu stimulus

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian.

Krugman (1996) mengindikasikan tentang 2 hal yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian daerah, yaitu pemahaman terhadap potensi daerah yang mampu meningkatkan *performance* ekonomi serta identifikasi tentang korelasi antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan aglomerasi. Hal ini sejalan dengan Harrod dan Domar yang menitikberatkan bahwa investasi mempunyai peran ganda yaitu menimbulkan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar jumlah kapital (Suparmoko, 2000: 51); serta peningkatan tersebut akan selalu diikuti penambahan dalam kesempatan kerja.

Distribusi pendapatan, perputaran uang dan peningkatan PAD bagi suatu daerah merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, untuk meningkatkan PAD, berarti pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menarik minat investor asing guna memperbaiki perekonomian suatu daerah (dalam hal ini misalnya Provinsi Jawa Timur karena pemerintah daerah tidak mungkin terus menerus bergantung hanya dari investasi dalam negeri pemerintah pusat).

Investasi swasta maupun investasi pemerintah yang diberikan dapat menjadikan perekonomian suatu daerah menjadi lebih baik. Investasi yang diberikan sebagai proyek pembangunan akan menyerap tenaga kerja; sehingga

dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah yang berasal dari komponen pajak penghasilan tenaga kerja.

Investasi tersebut masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, kurang terjaminnya kepastian hukum bagi investor terutama investor asing. Kendala lain dalam rangka menarik investor yaitu berupa persaingan iklim investasi dengan beberapa negara Asia Pasifik terutama Cina, Vietnam, India, Thailand. Dalam rangka menarik minat investor melakukan investasi terutama investor swasta, maka sangat diperlukan penyediaan infrastruktur yang memadai misalnya jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon.

Penyediaan infrastruktur tergolong barang publik yang anggarannya terlebih dahulu ditentukan dengan pendapatan daerah karena pihak swasta enggan melakukan penanaman modal bagi penyediaan barang publik. Investasi swasta merupakan investasi dilakukan oleh pihak swasta yang diperlukan untuk menutup dana bagi pembiayaan pembangunan baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Sebagaimana terlihat dalam (Tabel 1.1,halaman 5) bahwa investasi pemerintah daerah pada tahun 1996 sampai tahun 1998 dan tahun 2001 sampai tahun 2002 mengalami penurunan. Sama halnya dengan investasi swasta secara umum, dimana pada tahun 1996 sampai dengan 2000 mengalami kenaikan. Angka yang terbesar adalah pada tahun 1998 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 26%, sedangkan yang paling sedikit adalah tahun 1996 sebesar -59%. Begitu juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 1997 sampai dengan 1998 mengalami penurunan sebesar lebih

dari 108 miliar rupiah dengan tingkat penurunan sebesar 39%. Kenaikan yang terbesar adalah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 1999 sebesar 122.255.469 ribu rupiah (lebih dari 122 miliar rupiah) dengan tingkat kenaikan sebesar 74%.

Tabel 1.1.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur,
Pertumbuhan Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah
(Dalam Ribu Rupiah)**

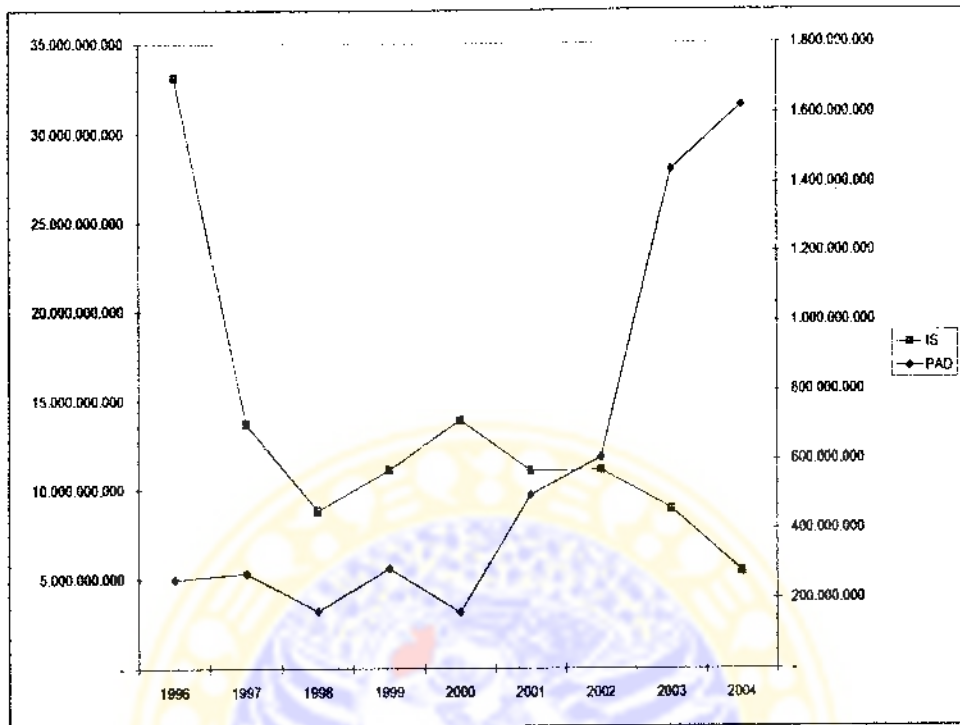
Tahun	PAD Jawa Timur *	Persentase PAD	Pertumbuhan Investasi Swasta ** (Persentase)	Pertumbuhan Investasi Pemerintah*** (Persentase)
1996	254,494,870		-59	43,9
1997	273,377,970	7,42	-36	12,9
1998	164,408,302	-39,86	26	-21,0
1999	286,663,771	74,36	25	9,71
2000	360,554,009	25,78	-20	20,6
2001	498,845,836	38,36	1	10,4
2002	607,926,508	21,87	-20	80,5

Sumber : * Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 1996-2002, diolah.

** PDRB Indonesia, BPS, 1996-2002, diolah.

*** Statistik Indonesia, BPS, 1996-2002, diolah.

Investasi pemerintah daerah sama halnya dengan investasi swasta mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 1996 sampai tahun 1998 dan tahun 2000 sampai tahun 2001 mengalami penurunan. Angka yang terbesar adalah pada tahun 1996 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 43,9%, sedangkan yang paling sedikit adalah tahun 1998 sebesar -21%.



Sumber : PDRB Jawa Timur, BPS Jawa Timur, tahun 1996 sampai 2004, diolah.

Gambar 1.1

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan
Investasi Swasta Jawa Timur
Tahun 1996 Sampai Dengan 2004**

Setiap negara termasuk Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi. Seperti yang tampak pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa investasi swasta di Jawa Timur jika dilihat dari angka nominal terlihat lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa berusaha mencari investor (untuk berinvestasi) untuk meningkatkan PAD melalui mekanisme fiskal daerah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan sehingga

menimbulkan pendapatan dalam masyarakat dan menjadi pajak penghasilan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa “Analisis Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur 1996 Sampai Dengan 2006” merupakan sebuah hal yang penting dan kontemporer.

1.2. Rumusan Masalah :

1. Apakah investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan 2006?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta; dengan kata lain mempunyai hubungan timbal balik (saling mempengaruhi) pada tahun 1996 sampai dengan 2006?

1.3. Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui dan menguji investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan 2006.
2. Mengetahui dan menguji investasi swasta mempunyai hubungan timbal balik dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan 2006.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Investasi Swasta

Investasi dalam arti ekonomi adalah pembelian alat-alat produksi (termasuk di dalamnya barang-barang untuk dijual), dengan modal berupa uang (Winardi, 1998: 271). Investasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian (Sukirno, 2004: 366). Investasi swasta dalam teori ekonomi berarti sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan mengganti terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi swasta merupakan *volatile*, yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Melalui pengertian investasi swasta tersebut, maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman mengenai insentif investasi (*investment incentives*); yaitu investasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk merangsang investasi sektor swasta (*privat sector*), baik yang bersifat umum maupun dalam bidang tertentu (Pass dan Bryan, 1998: 332-333). Rangsangan yang diberikan pemerintah pusat atau daerah dapat berupa bantuan modal untuk

peralatan atau pembebasan pajak daerah dan mengusahakan infrastruktur untuk mencari calon investor; dengan tujuan memberi area pengembangan dengan memberikan tambahan bantuan dalam mengatasi masalah pengangguran dan pembaharuan daerah perkotaan.

Fluktuasi kegiatan ekonomi sering kali berhubungan dengan perubahan dalam kegiatan investasi. Menurut Suparmoko (2000: 367–368), peranan investasi bersumber dari tiga (3) fungsi penting yaitu :

1. Kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional; di mana peningkatan tersebut akan selalu diikuti oleh pertambahan dalam kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan sehingga akan menstimulir pertambahan produksi nasional dan kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi sehingga akan memberikan sumbangan penting atas kenaikan produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat.

Peranan investasi menurut Tugan dan Baranowsky (Djojohadikusumo, 1991: 248) adalah sebagai faktor pendorong utama kegiatan ekonomi. Fluktuasi investasi yang naik dan menurun, sehingga menyebabkan fluktuasi kegiatan ekonomi. Produksi barang modal menimbulkan permintaan akan barang lain, sehingga meningkatkan permintaan umum akan hasil produksi lain, yang akhirnya pendapatan bertambah. Jadi simpulan yang dihasilkan dari teori Tugan–Baranowsky adalah bahwa meningkatnya investasi karena didorong oleh

bertambahnya pihak yang memiliki dana, sehingga menginvestasikan dananya.

Sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Tugan-Baranowsky, tahap pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Musgrave (dalam Mangkusubroto, 1993: 173), bahwa pada tahap menengah, investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP semakin kecil. Selanjutnya pada tahap lanjut, dalam pembangunan ekonomi (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke aktivitas sosial.

2.1.2. Teori Spasial dan Konsep Anggaran

Menurut Djamin (1984: 8) bahwa pembangunan ekonomi adalah terjadinya perubahan yang terencana pada struktur produksi dan kesempatan kerja sehingga peranan sektor pertanian menurun dan sektor industri serta jasa makin meningkat. Terdapat beberapa teori (model) yang secara parsial menerangkan atau membantu memahami tentang pembangunan ekonomi suatu daerah, dikarenakan belum adanya teori secara kompherensif. Beberapa pendapat model tersebut di antaranya :

1. *Cumulative Caution*

Model ini dipelopori oleh Myrdal (1957) dan Kaldor (1970) (dalam Kaldor,1970). Peningkatan pemerataan pembangunan dapat terjadi dengan adanya kekuatan campur tangan pemerintah (selain mekanisme pasar). Kegiatan aktif pemerintah tersebut antara lain dalam bentuk pembangunan wilayah terutama untuk daerah yang masih terbelakang.

2. *Core Periphery*

Model yang dipelopori oleh Friedman (1963) ini menjelaskan bahwa pembangunan Kota sebagian besar ditentukan oleh keadaan desa-desanya. Sebaliknya, bahwa pembangunan suatu desa juga ditentukan oleh arah pembangunan di perKotaan. Jadi terdapat hubungan yang erat antara pembangunan desa (*periphery*) dan pembangunan di Kota (*core*).

Dalam pelaksanaan kebijakan anggaran, terdapat beberapa alternatif sistem penganggaran bila dikaitkan dengan keadaan ekonomi yang sedang dihadapi oleh daerah-daerah dalam lingkup negara berkembang, yaitu (Syamsi, 1994: 64) :

1. Sistem anggaran surplus

Digunakan pada saat keadaan ekonomi mengalami inflasi, untuk mengantisipasi perlu diseimbangkan kembali jumlah uang dan barang dengan menambah banyaknya barang yang beredar. Dengan sistem penganggaran surplus, maka kelebihan penerimaan uang digunakan untuk meningkatkan produksi barang. Cara ini merupakan keseimbangan (*equilibrium*) dinamis. Dapat juga digunakan cara keseimbangan statis, yaitu dengan cara kelebihan penerimaan pemerintah tidak dikeluarkan lagi, sehingga tidak ada kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat. Ekuilibrium dinamis lebih diharapkan daripada ekulibrium statis.

2. Sistem anggaran defisit

Sistem anggaran ini digunakan apabila keadaan ekonomi dalam keadaan deflasi, di mana jumlah barang dan jasa dalam masyarakat lebih besar daripada jumlah uang beredar. Pemerintah harus mengusahakan agar

terjadi keseimbangan dari keduanya. Dalam sistem anggaran defisit ini berarti penerimaan uang negara lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya. Untuk memenuhi pengeluaran uang yang berlebihan itu diperlukan tambahan dana, misalnya dengan meningkatkan jumlah pinjaman luar negeri atau menciptakan uang baru. Dengan demikian maka terjadi keseimbangan kembali antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat.

3. Sistem anggaran berimbang

Jika keadaan suatu ekonomi normal, di mana dalam negara itu terjadi inflasi, tetapi lajunya masih satu digit per tahun, berarti ada keseimbangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat. Sisi pengeluaran pemerintah lebih ditujukan untuk pengeluaran pembangunan atau belanja negara. Pada tahun 1880-an, seorang ahli ekonomi Jerman, Adolph Wagner dalam tulisannya mengemukakan tentang “hukum peningkatan pengeluaran pemerintah”. Wagner menganggap, mungkin di dalam mengantisipasi kecenderungan yang menjadi kenyataan pada 50 sampai 100 tahun kemudian bahwa perkembangan masyarakat industri modern akan meningkatkan “tekanan atas kemajuan masyarakat”, secara politis dan menghendaki peningkatan dimasukkannya “pertimbangan sosial” dalam menjalankan industri. Wagner dalam *Law of Ever Increasing State Activity* (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan pemerintah) bahwa pengeluaran pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun baik dalam arti uang, riil, absolut

maupun relatif dalam perbandingannya dengan GNP yang disebabkan adanya perkembangan sosial dan industri (Musgrave, 1991: 106–107).

Menurut Suparmoko (2000: 47), penilaian pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas, pengeluaran dapat langsung memberi kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat serta menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang luas.

Berdasarkan penilaian tersebut, maka pengeluaran pemerintah dibagi menjadi lima, di antaranya (Suparmoko, 2000: 48) :

1. *Self Liquidating* adalah pengeluaran pemerintah mendapat pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang / jasa misalnya untuk jasa perusahaan negara.
2. *Reproduktif* adalah mewujudkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yaitu dengan naiknya penghasilan dan tarif pajak yang akhirnya meningkatkan penerimaan pemerintah misal untuk pengairan, pendidikan, kesehatan.
3. Tidak *self-liquidating* maupun tidak reproduktif yaitu langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat, dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional, misalnya rekreasi dan pendirian monumen.
4. Secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya pembiayaan pertahanan atau perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.

5. Merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu dan jika tidak sekarang maka kebutuhan pemeliharaan mereka pada usia yang lebih lanjut pasti lebih besar.

Pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh :

1. Pengeluaran untuk barang dan jasa yang disebabkan :
 - a. Pertumbuhan pendapatan per kapita
 - b. Perubahan teknis; perubahan teknologi mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan porsi pengeluaran, sehingga dapat menentukan barang-barang yang harus disediakan oleh pemerintah.
 - c. Perubahan populasi
 - d. Biaya relatif dari jasa publik
 - e. Urbanisasi.
2. Perubahan ruang lingkup transfer
3. Tersedianya dasar pengenaan pajak.
4. Pengaruh awal pembiayaan perang.
5. Faktor sosial dan politik

Selain itu Musgrave membagi penyebab pertumbuhan berdasarkan jenis pengeluarannya menjadi tiga hal (Musgrave, 1991: 125-127) :

1. Berdasarkan tingkat pemerintahan, di mana tingkat pemerintahan adalah struktur pemerintahan sebuah negara; struktur paling rendah adalah Kabupaten/Kota dan yang tertinggi adalah Pemerintah Pusat. Semakin

tinggi struktur pemerintahannya, maka semakin besar porsi pengeluaran pemerintah dalam PDB.

2. Proporsi pengeluaran pertahanan dan pengeluaran sipil.
3. Belanja barang dan pegawai.

Adapun sisi penerimaan negara/daerah berasal dari sektor perpajakan.

Fungsi dan manfaat pajak secara rinci diuraikan oleh John F. Due sebagai berikut (Muhammad, 1989) :

1. Pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Pajak dapat digunakan untuk mendorong atau merangsang jenis-jenis investasi yang dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional, dengan jalan memberikan kemudahan-kemudahan dalam bidang perpajakan. Misalnya: pemerintah memberikan *tax holiday* kepada para investor yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah Indonesia kawasan timur. Sebaliknya pajak pun dapat digunakan untuk membatasi jenis-jenis investasi yang hanya memberikan sumbangan yang kecil bagi pembangunan nasional.
3. Pajak dapat digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata.
4. Pajak dapat digunakan untuk membatasi impor barang-barang mewah dan barang-barang lainnya yang merugikan masyarakat dengan cara pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang tersebut. Sebaliknya pajak pun

dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan ekspor barang-barang dengan cara pengenaan tarif pajak yang rendah ataupun membebaskannya.

Pajak dapat mendorong pemanfaatan faktor produksi tanah secara lebih produktif. Misalnya, tanah-tanah dan juga bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di daerah-daerah yang strategis, ditinjau dari sudut ekonomi, dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang strategis.

Pengertian keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; adalah :

”Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Anggaran daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Pamuji (dalam Kaho, 2003: 18) bahwa pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup, sehingga keuangan yang menjadi salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah dihadapkan pada dua (2) hasil guna yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Peningkatan penerimaan daerah, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan pemerintah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber PAD menurut Pasal 4 UU No 25 Tahun 1999 berasal dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2.1.3. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1. Definisi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang "lebih baik" atau "lebih manusiawi" (Todaro, 1998: 19).

Menurut Prof.Goulet, menyatakan bahwa ada tiga (3) komponen atau nilai inti yang harus dijadikan pedoman untuk memahami pembangunan yang paling hakiki; yaitu:

a. Kecukupan (*sustenance*)

Kecukupan yang dimaksud adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja tidak terpenuhi, maka muncullah "keterbelakangan absolut". Semua orang harus "memiliki kecukupan untuk mendapatkan lebih"; dikarenakan kenaikan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan absolut, penambahan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan merupakan faktor yang harus ada bagi pembangunan.

b. Jati diri (*self esteem*) :

Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan diri sendiri untuk maju, menghargai diri sendiri, merasa diri pantas dan layak melakukan sesuatu; yang kesemuanya itu terangkum dalam satu istilah yaitu jati diri.

c. Kebebasan (*freedom*) :

Kebebasan berarti kemampuan untuk memilih; yang meliputi pilihan dalam konsep kebebasan politik, keamanan pribadi, kepastian hukum, kemerdekaan berekspresi, partisipasi politik, dan persamaan kesempatan.

Adapun komponen yang spesifik atas kehidupan "lebih baik" dan proses pembangunan memiliki tiga (3) tujuan inti yaitu :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi kebutuhan hidup pokok.
- b. Peningkatan standar hidup
- c. Perluasan pilihan ekonomis bagi individu secara keseluruhan

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara/daerah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, terdapat tiga (3) faktor utama :

- a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c. Kemajuan teknologi.

Kuznets mengemukakan ada enam (6) karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi; yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara yang mulai maju untuk merambah daerah pemasaran baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi.

Apabila suatu negara berkembang dapat melaksanakan semua karakteristik pertumbuhan yang saling berkaitan melalui "penerapan secara massal inovasi teknologi", maka akan mampu mencapai pertumbuhan dan surplus ekonomi yang cepat, sehingga akan memutar roda perekonomian lebih lanjut.

2.1.3.2. Teori Perubahan Struktural dan Pola Pembangunan

Teori perubahan struktural memusatkan perhatiannya pada negara dan daerah yang hanya mampu mencukupi kebutuhannya sendiri (tradisional/terbelakang) menuju perekonomian yang modern, berorientasi pada kehidupan perKotaan, industri manufaktur, dan sektor jasa yang tangguh.

Teori perubahan struktural mula-mula dirumuskan oleh W. Arthur Lewis (penerima Nobel tahun 1950-an), sebagai "Model Dua Sektor Lewis" (*Lewis two-sector model*), kemudian diformalkan dan dikembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis. Perekonomian yang terbelakang menurut Lewis, terdiri dari dua (2) sektor, yaitu :

1. Sektor industri perkotaan/perKotaan modern

Perkotaan/perKotaan yang tingkat produktivitasnya tinggi dan mempunyai menjadi *tempat penampungan* tenaga kerja. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja dimungkinkan adanya perluasan *output* pada sektor modern; di mana perluasan tersebut ditentukan oleh tingkat investasi di bidang industri dan akumulasi modal. Peningkatan investasi ditentukan oleh kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah (dengan asumsi bersedia menanamkan kembali seluruh keuntungannya).

2. Sektor tradisional

Tradisional yang dimaksud adalah sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk. Sektor tersebut ditandai dengan produktivitas tenaga kerja sama dengan nol (0). Kondisi ini dinamakan surplus tenaga kerja bahwa tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian dan tidak kehilangan outputnya.

Teori Lewis mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal. Semakin cepat tingkat akumulasi modal maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern. Dengan tingginya pertumbuhan tersebut maka semakin cepat penciptaan lapangan kerja baru (juga yang lainnya), sehingga tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi.

Hollis B. Chenery, seorang ekonom dari Universitas Harvard juga menyusun model/teori perubahan struktural. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery secara *cross sectional* (antar negara dengan periode tertentu) maupun antar waktu (*time series*). Faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan antara lain adalah pola perekonomian agraris ke perekonomian industri dan perkembangan perkotaan terutama pusat industri dikarenakan migrasi para pencari kerja dari daerah (pedesaan dan Kota kecil).

Analisis pola pembangunan (*patterns-of-development analysis*), juga memusatkan perhatiannya pada proses yang mengubah struktur ekonomi, industri dan kelembagaan secara bertahap pada perekonomian yang terbelakang. Sehingga memungkinkan tampilnya industri baru untuk menggantikan sektor pertanian sebagai penggerak roda pembangunan. Pada pola pembangunan menyatakan bahwa tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi

2.1.4. Teori Harrod-Domar

Setiap perekonomian pada dasarnya memerlukan tabungan (*saving*) dari sebagian pendapatannya guna menggantikan barang-barang modal yang rusak.

No	Nama	Judul	Hasil	Hubungan dengan penelitian penulis	
				Persamaan	Perbedaan
			kebijakan reformasi ekonomi mempunyai kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pola pertumbuhan jangka panjang, sebagaimana perbaikan kesenjangan antara daerah yang maju dengan daerah terbelakang.	pertumbuhan jangka panjang berikut <i>incme distribution</i> yang fair.	
3	Swenson & Eathington	Determining the Regional Economic Values of Ethanol Production in Iowa Considering Different Levels of Local Investment	<p>Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk menganalisis mengenai penerapan konsep ekonomi dalam produksi ethanol; untuk menggabungkan data input – output yang berkaitan dengan produksi maupun distribusi ethanol; dan mengklasifikasikan pendapatan daerah dari data produksi ethanol yg telah ada.</p> <p>Hasil penelitian secara umum menjabarkan bahwa pola input yang tepat atas produk ethanol akan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, lonjakan permintaan timbul di saat harga pasar ethanol meningkat. Investasi lokal akan menyebabkan efek pertumbuhan lokal, namun akan menurun disaat tingkat profitabilitas ethanol menurun.</p>	Persamaan diantara keduanya berupa penggunaan variabel terikat berupa pendapatan daerah (<i>regional income</i>).	Perbedaannya antara lain penggunaan variabel bebas berupa investasi swasta untuk penelitian terdahulu dan variabel PAD.

2.3. Model dan Hipotesis Penelitian

Konsep model dalam penelitian ini adalah terdapatnya hubungan kausalitas (timbal balik) antara PAD dengan investasi swasta di daerah. Secara matematis, konsep tersebut dijabarkan sebagai berikut (Filler *et al*, 1999) :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \sum_{i=1}^m \alpha_i Y_{it-1} + \sum_{i=1}^m \delta_i X_{it-1} + u_{it}$$

Di mana:

Y adalah Pendapatan Asli daerah (PAD)

X adalah Investasi Swasta

i adalah Kabupaten/Kota

t adalah tahun atau komponen data urut waktu

α δ merupakan koefisien kausalitas.

Adapun 2 hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. H_0 adalah investasi swasta tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. H_0 adalah investasi swasta tidak mempunyai hubungan timbal balik dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan dalam bentuk perhitungan formulasi matematis yang menitikberatkan pada pengujian hipotesis. Selain itu juga dilakukan studi literatur mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, khususnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

3.2. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendapatan Asli Daerah (*PAD*) dan Investasi Swasta di daerah (*IS*).

3.3. Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kerancuan makna dari variabel-variabel yang digunakan dalam model analisis, maka berikut ini diberikan definisi operasional yang merupakan batasan dan penjelasan dari beberapa variabel yang digunakan, sehingga penelitian yang dilakukan dapat terarah pada pokok permasalahannya, yang meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan realisasi penerimaan daerah (*regional revenues*) yang diterima dalam kurun

waktu tertentu dan data yang digunakan adalah data tahunan dengan satuan Rupiah (Rp) untuk Provinsi Jawa Timur.

- b. Investasi swasta yang digunakan dalam penelitian ini berupa *proxy* atas realisasi investasi swasta untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian. Adapun satuan yang digunakan berupa Rupiah (Rp).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan unit waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2006 dan unit *cross section* 37 Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim. Data panel adalah penggabungan antara data *time series* (urut waktu) dengan data *cross section*. Pada beberapa tahun akhir periode penelitian tidak dapat ditemui data yang berkaitan dengan pembentukan investasi swasta daerah, yang disebabkan belum adanya publikasi mengenai data tersebut. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain :

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku pustaka, jurnal ekonomi dan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.
3. Data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan sebagai bahan masukan terutama untuk analisis dan pembahasan.
4. Data *Internet Service*, yang telah diolah kembali oleh peneliti.

5. **Data olahan**, merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil perhitungan dari satu atau lebih variabel. Dalam hal ini, data pengolahan dalam penelitian ini adalah variabel Investasi Swasta. Investasi swasta di daerah merupakan data olahan dari beberapa elemen yaitu, data investasi pemerintah daerah (pengeluaran pemerintah) berikut data ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tertentu. Terdapat dua tahap untuk memperoleh data investasi swasta di daerah. Tahap pertama, memperoleh data total investasi atas seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, melalui pengkafian antara data ICOR Jatim dengan data pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota). Tahap Kedua, data investasi total tersebut dikurangkan dengan data pengeluaran pemerintah daerah. Adapun satuan yang digunakan adalah Rupiah (Rp).

3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Pembagian Kuadran

Wilayah observasi (penelitian) akan terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu:

- Secara Keseluruhan (Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)
- Kuadran 1
- Kuadran 2
- Kuadran 3
- Kuadran 4

Pembagian ke dalam beberapa kuadran tersebut mengacu kepada rata-rata pertumbuhan kabupaten/kota yang bersangkutan dengan rata-rata pertumbuhan

Provinsi Jawa Timur. Kuadran 1 merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan variabel PAD dan investasi swasta kabupaten/kota di dalamnya lebih besar dibanding rata-rata Jawa Timur. Kuadran 2 merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta lebih tinggi dibanding Jawa Timur, namun rata-rata pertumbuhan PAD-nya lebih rendah dibanding dengan Jawa Timur. Kuadran 3 merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta lebih rendah dibanding Jawa Timur, namun rata-rata pertumbuhan PAD lebih tinggi dibanding dengan Jawa Timur. Kuadran 4 merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan variabel PAD dan investasi swasta kabupaten/kota didalamnya lebih rendah dibanding dengan rata-rata Jawa Timur.

3.6.2. Uji Kausalitas

Salah satu model yang lazim digunakan dalam uji kausalitas adalah Model Granger (1969). Model tersebut dituliskan sebagai berikut :

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{l=1}^m \alpha_l y_{t-l} + \sum_{k=1}^n \delta_k x_{t-k} + u_t \quad (3.1)$$

Di mana:

Y adalah variabel terikat

X adalah variabel bebas

α δ merupakan koefisien kausalitas.

Eakin *et al* (1985) mereferensikan model pengujian kausalitas untuk data panel :

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{k=1}^m \alpha_k y_{it-k} + \sum_{k=1}^m \delta_k x_{it-k} + u_{it} \quad (3.2)$$

Di mana:

Y adalah variabel terikat

X adalah variabel bebas

i merupakan komponen data cross section (unit)

t merupakan komponen data urut waktu

α δ merupakan koefisien kausalitas.

Pengujian selanjutnya adalah menguji *individual effect* dengan *diffrencing equation* melalui teknik *generalized least square* (GLS) pada model 3.3. sebagaimana berikut:

$$y_{it} - y_{it-1} = \sum_{k=1}^m \alpha_k (y_{it-k} - y_{it-k-1}) + \sum_{k=1}^m \delta_k (x_{it-k} - x_{it-k-1}) + (u_{it} - u_{it-1}) \quad (3.3)$$

Di mana:

Y merupakan variabel terikat

X merupakan variabel bebas

i merupakan komponen data cross section (unit)

t merupakan komponen data urut waktu

α δ merupakan koefisien kausalitas.

Konsekuensi model di atas adalah parameter *constant* sepanjang waktu dan setiap unit *cross section*. Chamberlain (1983) mengemukakan metode *time invariant* berikut *cross section* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 y_{i1} &= \alpha_{01} + \alpha_{11}y_{i0} + \delta_{11}x_{i0} + \psi_1 f_i + u_{i1} \\
 y_{i2} &= \alpha_{02} + \alpha_{12}y_{i1} + \delta_{12}x_{i1} + \psi_2 f_i + u_{i2} \\
 y_{i3} &= \alpha_{03} + \alpha_{13}y_{i2} + \delta_{13}x_{i2} + \psi_3 f_i + u_{i3} \\
 y_{i4} &= \alpha_{04} + \alpha_{14}y_{i3} + \delta_{14}x_{i3} + \psi_4 f_i + u_{i4}
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

Dengan pembatasan sebagai berikut:

$$\delta_{11} = \delta_{12} = \delta_{13} = \delta_{14} = 0 \tag{3.5}$$

Setelah itu, Chamberlain (1983) mentransformasikan persamaan diatas dengan

meng-kalikan (ψ_{t+1}/ψ_t) dan kemudian mengurangi untuk periode $t + 1$.

$$\begin{aligned}
 y_{i2} &= (\alpha_{02} - r_2 \alpha_{01}) + (\alpha_{12} + r_2) y_{i1} - r_2 \alpha_{11} y_{i0} + \delta_{12} x_{i1} - r_2 \delta_{11} x_{i0} \\
 &\quad + (u_{i2} - r_2 u_{i1}) \\
 y_{i3} &= (\alpha_{03} - r_3 \alpha_{02}) + (\alpha_{13} + r_3) y_{i2} - r_3 \alpha_{12} y_{i1} + \delta_{13} x_{i2} - r_3 \delta_{12} x_{i1} \\
 &\quad + (u_{i3} - r_3 u_{i2}) \\
 y_{i4} &= (\alpha_{04} - r_4 \alpha_{03}) + (\alpha_{14} + r_4) y_{i3} - r_4 \alpha_{13} y_{i2} + \delta_{14} x_{i3} - r_4 \delta_{13} x_{i2} \\
 &\quad + (u_{i4} - r_4 u_{i3})
 \end{aligned}$$

Di mana:

$$r_2 = (\psi_2 / \psi_1)$$

$$r_3 = (\psi_3 / \psi_2)$$

$$r_4 = (\psi_4 / \psi_3)$$

Namun, Filer *et al.* (1999) mengemukakan tentang metode sederhana untuk menguji fenomena kausalitas (saling mengakibatkan) dalam data panel. Perbedaannya dengan Eakin *et al.* (1985) terletak pada keserempakan pengujian variabel observasi. Filer *et al.* (1999) menggunakan pengujian yang terpisah namun tetap disimpulkan secara serempak. Secara teknis, model ini tidak berbeda jauh dengan Model Granger (1969), perbedaannya terletak pada penyertaan unit *cross section*. Sebagaimana Model Granger (1969), maka Model Filer *et al.* (1999) terlihat sebagaimana berikut ini:

$$y_t = \alpha_0 + \sum_{l=1}^m \alpha_l y_{t-l} + \sum_{k=1}^n \delta_k x_{t-k} + u_t \quad (3.6)$$

Di mana:

Y adalah variabel terikat

X adalah variabel bebas

α δ merupakan koefisien kausalitas.

3.6.3. Penetapan *Lag* Optimal

Salah satu kesulitan menggunakan Kausalitas data panel adalah menetapkan *lag* yang optimal. Beberapa penelitian mutakhir untuk menetapkan

tingkat kelambanan yang optimal dapat menggunakan kriteria informasi yakni *Akaike Information Criteria* (AIC) dan *Schwartz Criteria* (SC). Pada mulanya AIC dan SC dipergunakan sebagai alternatif uji *goodness of fit* atau pengganti R^2 (*coefficient of determination*) sehingga R^2 bukanlah satu-satunya indikator validitas sebuah model ekonometri (Thomas, 1997:181-182). Perkembangan berikutnya AIC dan SC dapat digunakan untuk menetapkan tingkat kelambanan yang optimal (Thomas, 1997: 183):

$$AIC(q) = \text{Log}(e'e) / T + 2q/T \quad (3.6)$$

$$SC(q) = AIC(q) + (q/T)(\log T - 1) \quad (3.7)$$

Dari persamaan (3.6) dan (3.7) terlihat beberapa notasi seperti e adalah residual, sedangkan T merupakan jumlah sampel dan q adalah jumlah variabel yang beroperasi pada persamaan itu. Dalam menetapkan tingkat kelambanan yang paling optimal didasarkan atas nilai yang paling rendah dari AIC dan SC.

3.6.4 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji regresi secara keseluruhan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantungnya.

Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung,

$H_1 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq 0$, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantung.

b. Uji F dihitung dengan rumus :

$$F = (N - k) \frac{(ESS_R - ESS_{UR})}{q(ESS_{UR})}$$

Di mana :

ESS_{UR} adalah *Residual Sum Square* regresi *unrestricted*

ESS_R adalah *Residual Sum Square* regresi *restricted*

N adalah jumlah observasi,

k adalah jumlah parameter estimasi dalam regresi yang *unrestricted*, dan

q adalah jumlah parameter dalam regresi *restricted*.

c. Menentukan F Tabel dengan rumus :

- *Numerator* F adalah $k - 1$, di mana k adalah jumlah parameter estimasi dalam regresi yang *unrestricted*
- *Denominator* F adalah $N - k$, di mana N adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter estimasi dalam regresi yang *unrestricted*

d. Menentukan kriteria uji F, yaitu :

Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$, maka hipotesis nol ditolak, artinya bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk menguji kausalitas sebaliknya, maka prosedur uji dilakukan dengan metode yang sama, tetapi dengan membalik variabel dalam persamaan regresi di atas.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

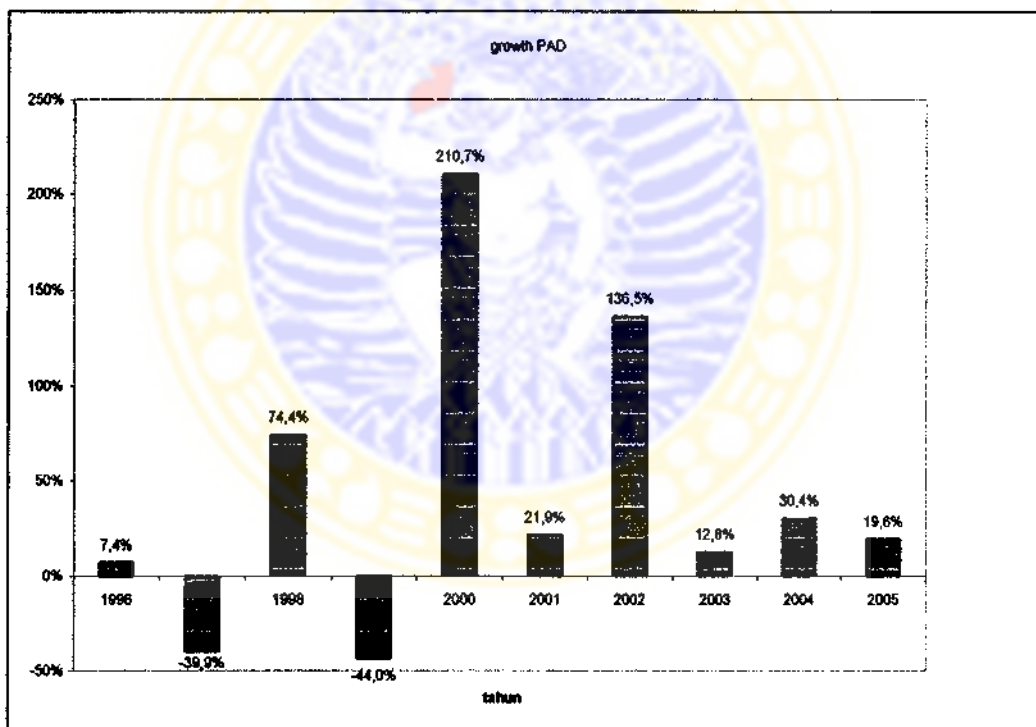
4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi Swasta di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 1996 sampai tahun 2006 dan dengan menggunakan data panel. Dalam komposisi data panel dimungkinkan data *cross section* diestimasi secara serempak dengan dataurut waktu (*time series*).

Namun, pembahasan variabel akan terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu secara keseluruhan untuk Jawa Timur, kemudian dibagi menjadi kuadran 1 sampai kuadran 4. Pada kuadran 1 (daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD dan investasi swasta di atas rata-rata pertumbuhan di Jawa Timur). Kuadran 2 (daerah dengan tingkat pertumbuhan investasi swasta yang lebih tinggi daripada rata-rata Jawa Timur namun tingkat pertumbuhan PAD lebih rendah).

Bagian lain adalah kuadran 3 (daerah dengan tingkat pertumbuhan investasi swasta yang dibawah rata-rata Jawa Timur, namun tingkat pertumbuhan PAD-nya lebih tinggi); dan kuadran 4 (daerah dengan tingkat pertumbuhan investasi swasta dan PAD yang lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan di Jawa Timur). Pembagian ke dalam beberapa kuadran ini dilakukan untuk menganalisis fenomena yang terjadi pada daerah yang relatif homogen satu sama lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur selama periode 1996 sampai dengan 2002 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Namun, pada tahun 1997 terjadi penurunan drastis sebesar sekitar 40%. Penurunan ini diindikasikan sebagai imbas daripada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada akhir semester I tahun 1997. Identifikasi sebab penurunan PAD Jatim ini juga terdapat pada pendapatan/kapital yang mencapai pertumbuhan negatif hingga mencapai 10 kali lipat (Bapeprov, 2004). Selain itu, PDRB juga mengalami *negatif growth* sebesar 161% (BPS Jatim, 2004).



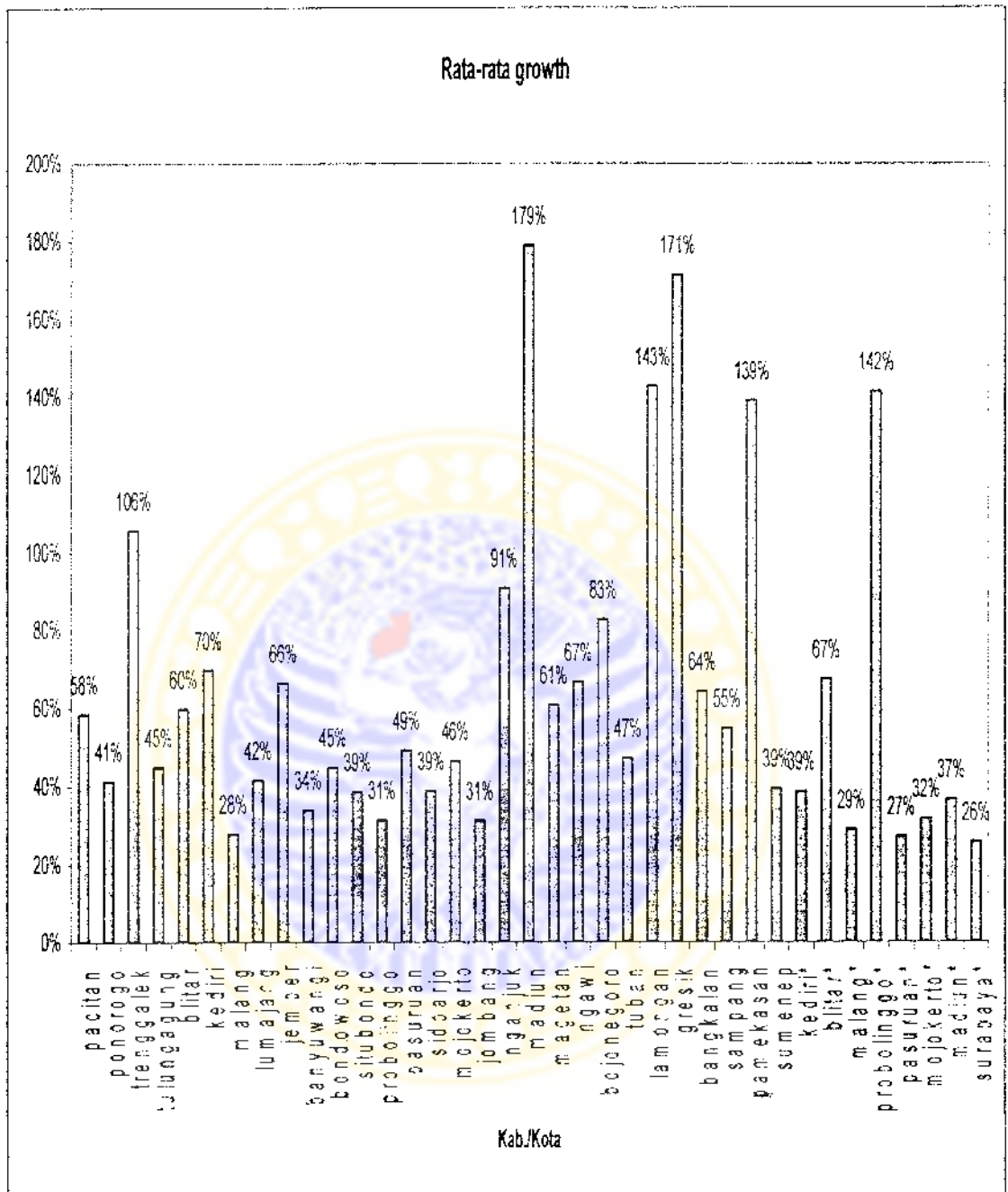
Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2005, diolah.

Gambar 4.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Jawa Timur
Tahun 1996 Sampai Dengan 2005

Momentum pertumbuhan terjadi pada tahun 2000, di mana PAD Jatim tumbuh sebesar lebih dari 200%. Namun, pertumbuhan ini tidak menghasilkan efek keberlanjutan pada kurun waktu berikutnya (tahun 2001 sampai dengan 2006). Periode 2001 sampai dengan 2006, pertumbuhan hanya berkisar antara 19% sampai dengan 30%, meskipun terdapat pengecualian di tahun 2002, di mana terjadi pertumbuhan hingga 137%.

Secara rata-rata regional, pertumbuhan yang paling rendah selama periode tersebut terdapat di Kota Surabaya (Gambar 4.2, halaman 34) sementara yang tertinggi terdapat di Kabupaten Madiun. Dan secara tahunan, PAD mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 1999, yaitu sebesar 74% dan yang terendah pada tahun 1998 (-39%).

Pola fluktuasi yang serupa terjadi pada Investasi Swasta (Gambar 4.3, halaman 36). Pada awal periode penelitian (tahun 1996), realisasi investasi swasta sebesar sekitar 17,5 milyar rupiah dan jumlah tersebut semakin menurun pada periode selanjutnya. Penurunan terbesar terdapat di tahun 1998 (41%) dan kemudian kembali naik di tahun 1999. Kedua fenomena ekonomi tersebut merupakan bukti bahwa krisis ekonomi Indonesia berimbas kepada perekonomian Jawa Timur. Krisis tersebut mengakibatkan lesunya perekonomian nasional dan investor cenderung untuk mengalokasikan dana atau keinginan investasinya di lain negara. Tingginya resiko serta biaya produksi ditengarai sebagai *constraint* investasi, sehingga pernyataan Harrod dan Domar yang menekankan bahwa investasi yang menjadi stimulus pertumbuhan dalam kesempatan kerja tidak terjadi. (Suparmoko, 2000 :51).

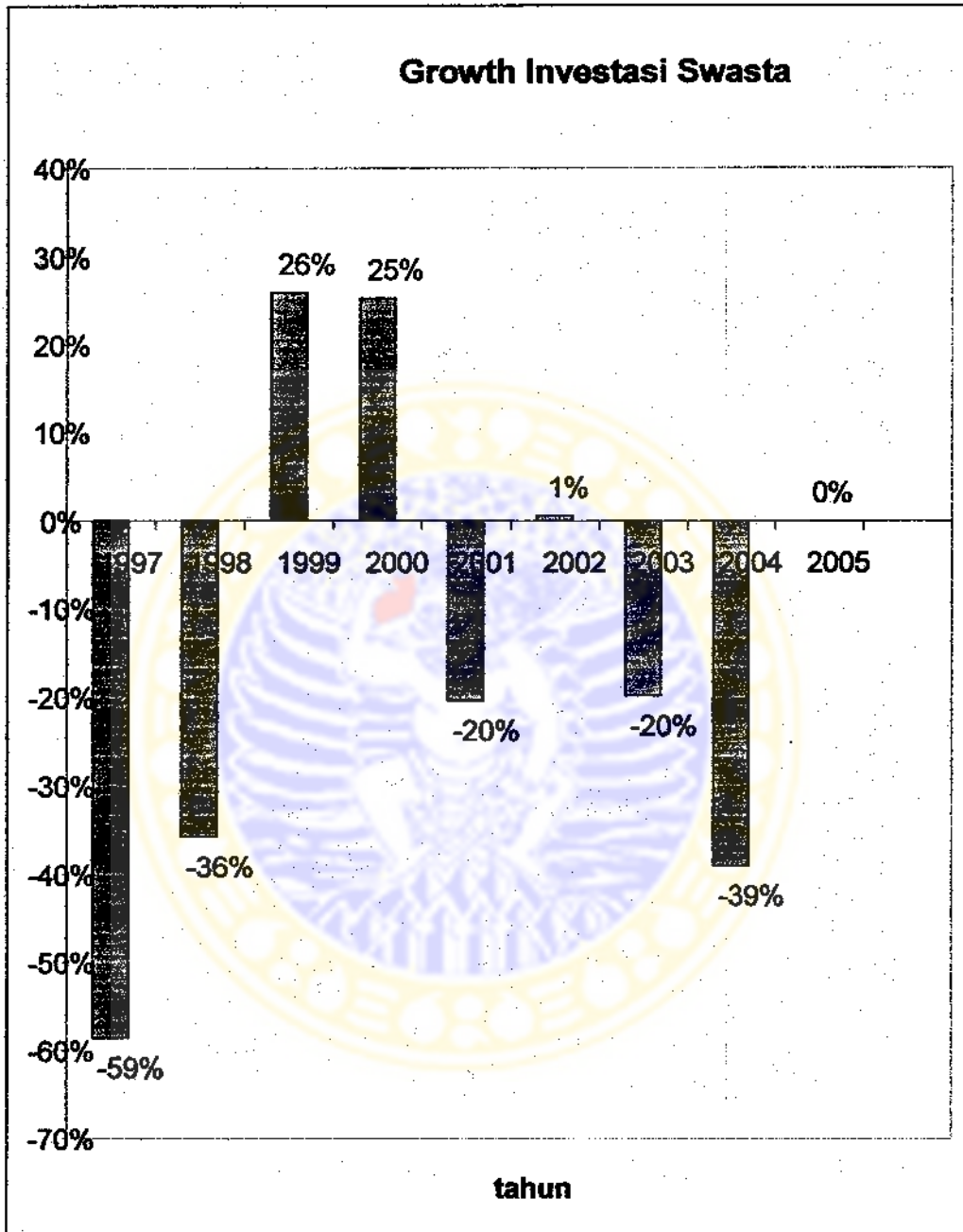


Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diolah.

Gambar 4.2
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 1996 Sampai Dengan 2006

Pada periode penelitian, setidaknya terdapat 7 daerah yang rata-rata pertumbuhannya mempunyai nilai negatif (mengalami *negatif growth*). Pada 7 daerah tersebut rata-rata pertumbuhan per tahun berkisar antara 1% hingga 21%. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Surabaya (IFS, Data diolah).

Distribusi pendapatan, perputaran uang dan peningkatan PAD bagi suatu daerah merupakan kegiatan pemerintah yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, untuk meningkatkan PAD, yang berarti pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menarik minat investor asing guna memperbaiki perekonomian Jawa Timur, karena pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mungkin terus menerus tergantung hanya dari investasi pemerintah daerah. Selama periode penelitian (1996 sampai dengan 2006), setidaknya 7% dari komponen pengeluaran pembangunan/investasi pemerintah berasal dari PAD. Diharapkan investasi swasta maupun investasi pemerintah yang diberikan dapat menjadikan perekonomian suatu daerah menjadi lebih baik.

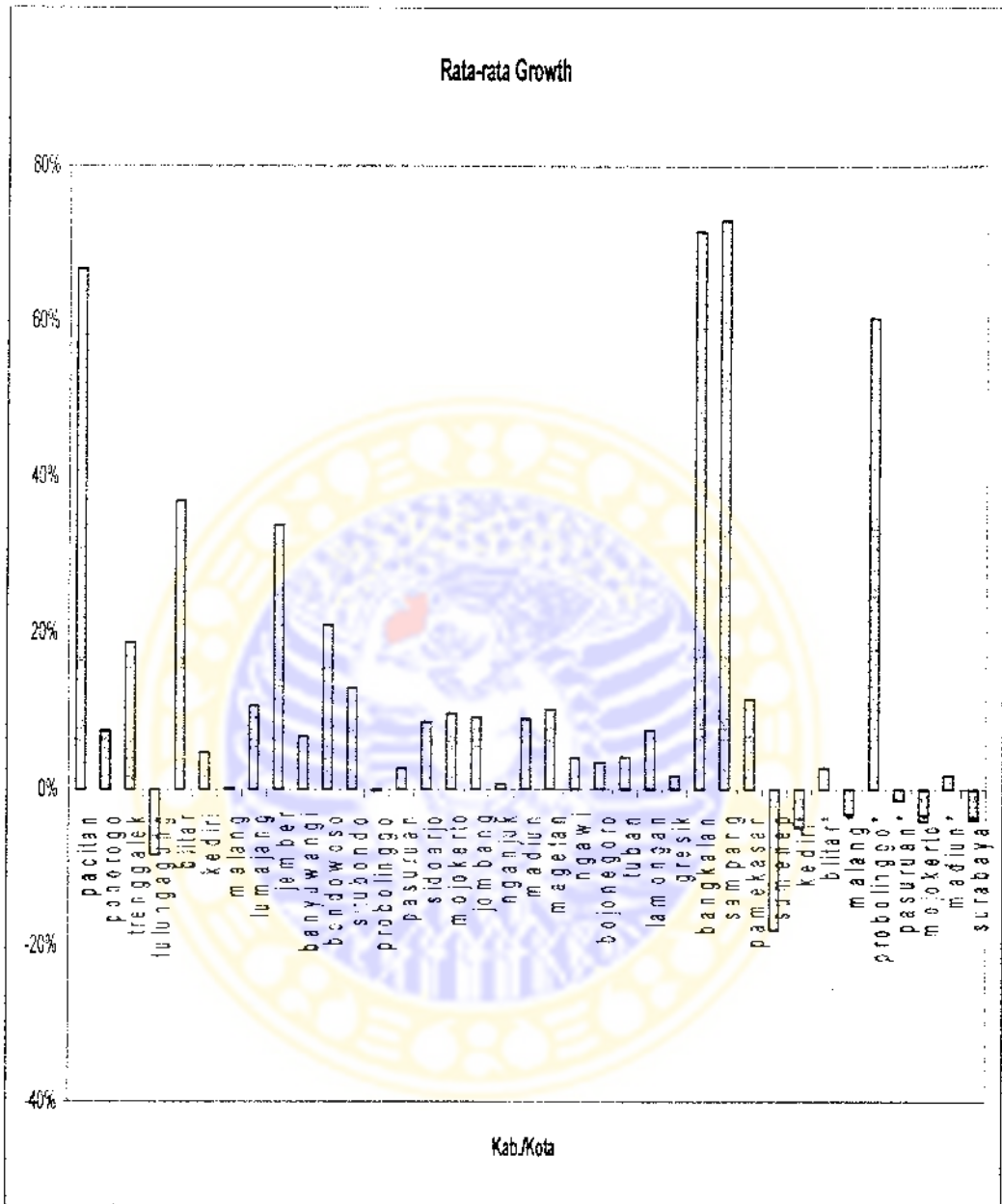


Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2005, diolah.

Gambar 4.3
Pertumbuhan Investasi Swasta
Jawa Timur Tahun 1996 Sampai Dengan 2005

Secara rata-rata, tingkat pertumbuhan investasi swasta Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan 2002 adalah 4% per tahun dan PAD adalah 21% per tahun. Nilai tersebut menjadi dasar pembagian Jawa Timur menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama merupakan grup yang ideal, atau grup dengan masing-masing *growth* di atas rata-rata Provinsi. Kuadran kedua merupakan grup yang mempunyai porsi peranan swasta yang besar dalam perekonomian daerahnya. Kuadran ketiga merupakan grup yang porsi PAD lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi, namun tingkat investasinya lebih rendah. Implikasi kuadran ketiga berupa kecilnya peran swasta dalam perekonomian daerah. Kuadran keempat (terakhir) merupakan grup ekstrem dengan klasifikasi tingkat pertumbuhan investasi swasta maupun PAD lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.1, bahwa anggota kuadran I adalah beberapa kota besar di Jawa Timur; yaitu Kabupaten Pacitan; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Blitar; Kabupaten Kediri; Kabupaten Jember; Kabupaten Bondowoso; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Nganjuk; Kabupaten Madiun; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Tuban; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Pamekasan; Kota Blitar; dan Kota Probolinggo. Ke-22 Kota tersebut juga memiliki kedekatan secara geografis, sehingga dimungkinkan pula terjadi kedekatan secara finansial ekonomi. Kuadran I merupakan grup dengan anggota paling banyak yang meliputi hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur (sekitar 59%).



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diolah.

Gambar 4.4
Rata-Rata Pertumbuhan Investasi Swasta
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 1996 Sampai Dengan 2006

Sementara itu, anggota kuadran 2 merupakan Kota atau kabupaten yang menjadi pusat industri beberapa diantaranya adalah pusat kegiatan ekonomi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Malang; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Jombang; Kota Kediri; Kota Malang; Kota Pasuruan; Kota Mojokerto; Kota Madiun; dan Kota Surabaya.

Selama periode penelitian dan dalam cakupan area Jawa Timur ternyata tidak ditemukan Kabupaten/Kota yang mempunyai spesifikasi/klasifikasi serupa dengan kuadran 3. Hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah (di bawah rata-rata provinsi), maka akan menimbulkan korelasi dengan Investasi Swasta (IS) daerah yang rendah, atau dengan kata lain langsung masuk kategori kuadran 4.

Pada kuadran 4, hanya terdapat satu anggota saja, yaitu Kabupaten Sumenep. Masuknya Kabupaten Sumenep dalam kuadran 4 ditengarai karena secara geografis posisi Kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur Pulau Madura dan dengan kondisi alam yang relatif gersang sehingga kontribusinya terhadap perekonomian rendah. Kuadran 4 merupakan daerah dengan kinerja perekonomian yang buruk, yaitu dengan tingkat pertumbuhan PAD dan investasi swasta di bawah rata-rata Provinsi. Secara keseluruhan Jawa Timur, pada tahun 1995 proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk adalah 47% (mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 1990). Namun, apabila diamati secara parsial proporsi angkatan kerja Kota Surabaya terhadap penduduk lebih besar dibanding

Jawa Timur, yaitu sebesar 52% untuk tahun 1995 dengan tingkat pertumbuhan sekitar 18% dari tahun 1990 (BPS, Tahun 1996 sampai 2002).

Tabel 4.1
Pembagian Kawasan (Kuadran)
Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kuadran	Kondisi	Jumlah Kabupaten/Kota	Identifikasi
I	Investasi Swasta <i>tinggi</i> – PAD <i>tinggi</i>	22	Kabupaten Pacitan; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Blitar; Kabupaten Kediri; Kabupaten Jember; Kabupaten Bondowoso; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Nganjuk; Kabupaten Madiun; Kabupaten Magetan; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Bojonegoro; Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan; Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Pamekasan; Kota Blitar; dan Kota Probolinggo
II	Investasi Swasta <i>tinggi</i> – PAD <i>rendah</i>	14	Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Malang; Kabupaten Lumajang; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Jombang; Kota Kediri; Kota Malang; Kota Pasuruan; Kota Mojokerto; Kota Madiun; dan Kota Surabaya
III	Investasi Swasta <i>rendah</i> - PAD <i>tinggi</i>	0	N/A
IV	Investasi Swasta <i>rendah</i> - PAD <i>rendah</i>	1	Kabupaten Sumenep
Jumlah		37	

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diolah.

4.2. Pembahasan

Secara empiris, kondisi perekonomian Jawa Timur periode 1996 sampai dengan 2006 akan dieksplorasi melalui pengujian ekonomi-matematik-statistik atau yang biasa dikenal dengan ilmu ekonometrika. Pembuktian secara empiris ini menggunakan metode uji timbal balik (kausalitas) yang memungkinkan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel penelitian saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Uji kausalitas menekankan pola hubungan dalam sebuah model ekonomi yang terjalin secara simultan, akan tetapi penjabaran secara parsial pun akan diketengahkan dalam pembahasan.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian *Lag*

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-402.7755	NA	3.99E+36	89.95011	89.99394	89.85553
1	-391.0315	15.65872	7.51E+35	88.22921	88.36070	87.94547
2	-379.8053	9.978786*	1.90E+35*	86.62341*	86.84254*	86.15051*

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Sumber : hasil pengolahan

Sebelum melalui tahap pengolahan data ke dalam model, terlebih dahulu ditentukan asumsi mengenai kelambanan waktu (*lag*) dalam periode penelitian. Sebagaimana diketengahkan sebelumnya bahwa penentuan asumsi *lag* menggunakan metode *Akaike Information Criterion* (AIC) atau *Schwarz Information Criterion* (SC). Hasil perhitungan *lag* disajikan dalam tabel berikut ini, di mana diketahui bahwa AIC maupun SC mereferensikan menggunakan penggunaan *lag* ke-2 dalam penelitian (lihat tanda bintang (*)) dalam tabel perhitungan *lag*).

Secara parsial (Tabel 4.3, halaman 43), diketahui bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh terhadap investasi swasta (IS) di semua kawasan penelitian kecuali di kuadran 4. Begitu juga dengan variabel IS yang terbukti mempunyai pengaruh terhadap PAD, kecuali di kuadran 4. Hal tersebut membuktikan bahwa unsur PAD mampu menjadi stimulator bagi investasi, dan berlaku sebaliknya. Anomali justru terjadi di kuadran 2, di mana terbukti secara parsial bahwa PAD mempengaruhi IS, namun IS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sementara itu, di kuadran 4 berlaku bahwa kedua variabel (baik IS maupun PAD) terbukti tidak punya pengaruh secara parsial atau bersifat independen satu sama lain.

Secara simultan (Tabel 4.4, halaman 54), diketahui bahwa pola relasional antara IS dan PAD di Jawa Timur adalah hanya bersifat kausalitas (PAD berhubungan secara timbal balik dengan IS atau terjadi hubungan dua arah). Penjabaran menurut kuadran menghasilkan temuan yang serupa, kecuali di kuadran 4 yang terbukti bahwa IS mempengaruhi PAD.

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Kausalitas

	<i>Y = IS</i>				<i>Y = PAD</i>			
	<i>1st</i> <i>Lagged</i> <i>Y</i>	<i>2nd</i> <i>Lagged</i> <i>Y</i>	<i>1st</i> <i>Lagged</i> <i>X</i>	<i>2nd</i> <i>Lagged</i> <i>X</i>	<i>1st</i> <i>Lagged</i> <i>Y</i>	<i>2nd</i> <i>Lagged</i> <i>Y</i>	<i>1st</i> <i>Lagged</i> <i>X</i>	<i>2nd</i> <i>Lagged</i> <i>X</i>
Total	0.50*** <i>0.06</i> <u>0.00</u>	0.05 <i>0.03</i> <u>0.11</u>	-0.21*** <i>0.06</i> <u>0.00</u>	- 1.16*** <i>0.12</i> <u>0.00</u>	0.74*** <i>0.08</i> <u>0.00</u>	0.50*** <i>0.09</i> <u>0.00</u>	0.007 <i>0.002</i> <u>0.36</u>	- 0.0004** <i>0.0002</i> <u>0.04</u>
Kuadran I	0.44*** <i>0.057</i> <u>0.00</u>	0.19*** <i>0.049</i> <u>0.00</u>	-0.20*** <i>0.056</i> <u>0.00</u>	-1.15*** <i>0.163</i> <u>0.00</u>	0.48*** <i>0.08</i> <u>0.00</u>	0.54*** <i>0.097</i> <u>0.00</u>	- 0.009*** <i>0.002</i> <u>0.00</u>	0.013*** <i>0.003</i> <u>0.00</u>
Kuadran II	0.60*** <i>0.09</i> <u>0.00</u>	0.07 <i>0.01</i> <u>0.20</u>	-2.67*** <i>0.67</i> <u>0.00</u>	1.35 <i>0.89</i> <u>0.13</u>	0.90*** <i>0.09</i> <u>0.00</u>	0.35** <i>0.12</i> <u>0.003</u>	0.003 <i>0.003</i> <u>0.34</u>	-0.0006 <i>0.0003</i> <u>0.11</u>
Kuadran III	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>	<i>N/A</i> <i>N/A</i> <u><i>N/A</i></u>
Kuadran IV	0.30 <i>0.15</i> <u>0.12</u>	0.09 <i>0.19</i> <u>0.64</u>	2.40 <i>2.93</i> <u>0.46</u>	-5.46 <i>3.27</i> <u>0.17</u>	0.61 <i>0.47</i> <u>0.26</u>	0.40 <i>0.36</i> <u>0.33</u>	-0.02* <i>0.01</i> <u>0.10</u>	-0.02 <i>0.02</i> <u>0.37</u>

Notes:

- Angka yang dicetak **tebal** adalah koefisien regresi
- Angka yang dicetak *miring* adalah *standart error* koefisien regresi
- Angka yang di-garis bawah adalah nilai probabilitas signifikansi
- Tanda 3 bintang (***) artinya signifikan pada tingkat kesalahan 1%
- Tanda 2 bintang (**) artinya signifikan pada tingkat kesalahan 5%
- Tanda 1 bintang (*) artinya signifikan pada tingkat kesalahan 10%.

Sumber : hasil pengolahan

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Hipotesis

	<i>Y</i>	<i>F test</i>	<i>F Tabel</i>	<i>Hasil</i>	<i>Simpulan</i>
ALL	<i>PAD</i>	445,4351	8,54	Ho ditolak	PAD ↔ IS
	<i>IS</i>	32,699	8,54	Ho ditolak	
Kuadran I	<i>PAD</i>	54,631	8,62	Ho ditolak	PAD ↔ IS
	<i>IS</i>	84,858	8,62	Ho ditolak	
Kuadran II	<i>PAD</i>	229,851	8,62	Ho ditolak	PAD ↔ IS
	<i>IS</i>	10,857	8,62	Ho ditolak	
Kuadran III	<i>PAD</i>	N/A			
	<i>IS</i>				
Kuadran IV	<i>PAD</i>	79,486	9,01	Ho ditolak	IS → PAD
	<i>IS</i>	5,659	9,01	Ho diterima	

Sumber : hasil pengolahan

Terdapat perbedaan berikut persamaan antara hasil pengujian secara parsial maupun simultan. Beberapa persamaan dijabarkan sebagai berikut; pengujian kuadran *I* secara parsial mengindikasikan bahwa PAD mempunyai pengaruh timbal balik (kausalitas) dengan IS, berikut juga pengujian secara simultan. Hasil pengujian untuk Jawa Timur juga membuktikan hasil yang sama antara parsial dengan simultan, yaitu keduanya cenderung mempunyai hubungan timbal balik.

Perbedaan yang timbul dijabarkan sebagai berikut; pengujian atas kuadran 2 secara parsial menimbulkan hasil bahwa PAD terbukti mempengaruhi IS, sedangkan secara simultan variabel tersebut terbukti mempunyai pola yang timbal balik. Sementara itu, pada pengujian untuk kuadran 4 secara parsial menghasilkan

temuan yang cenderung terjadinya independensi antara keduanya, sementara itu secara simultan diketahui bahwa IS mempengaruhi PAD.

Terdapat perbedaan hasil secara parsial dan simultan, yang terdapat pada pengujian terhadap Jawa Timur dan kuadran 4. Pengujian Jawa Timur secara parsial mengetengahkan hasil bahwa PAD mempengaruhi IS dan secara simultan diperoleh hasil bahwa IS mempengaruhi PAD. Pengujian atas kuadran 4 secara parsial menimbulkan hasil bahwa PAD terbukti mempengaruhi IS, sedangkan secara simultan variabel tersebut terbukti mempunyai pola yang independen. Pada uji dengan data *time series* (urut waktu), ketidaksamaan tersebut merupakan bukti terjadinya bias dalam spesifikasi model (*multicollinearity*).

Penyebabnya berasal dari adanya hubungan antara variabel bebas dalam model penelitian yang menyebabkan koefisien tidak bisa menaksir secara tepat. Gujarati (2004) mengetengahkan mengenai dua pendapat terhadap peristiwa *multicollinearity*, salah satu diantaranya adalah peristiwa ini merupakan *natural event*, sehingga keberadaannya dalam model uji penelitian ini diasumsikan sebagai akibat dari peristiwa alami dalam realita.

Pola hubungan yang terjadi antara PAD dengan IS yang terjadi di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan bahwa konsep pertumbuhan sarana dan infrastruktur daerah sebagai akibat dari pertumbuhan PAD akan menyebabkan pertumbuhan investasi swasta (IS) terbukti secara empiris, demikian pula sebaliknya. Pada tahun 2003, tercatat bahwa PemProv. Jawa Timur memperoleh PAD sejumlah +/- Rp. 1,4 M di mana kontribusi terbesar berasal dari komponen Pajak dan Retribusi. Sedangkan di tahun 2003, tercatat nominal Rp. 1,4 Milyar untuk pembiayaan

1,45% dengan tingkat kontribusi investasi swasta daerah sebesar 21,5%. Pada tingkat kontribusi PAD dan IS daerah terhadap PDRB yang relatif lebih besar dibanding kuadran lainnya ternyata menimbulkan menghasilkan pola kausalitas antara PAD dengan IS. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu komponen pengeluaran pembangunan daerah atau pembiayaan daerah adalah PAD.

Tahun 2003 sampai dengan 2004, kontribusi PAD terhadap total pengeluaran pemerintah hanya berkisar 10%, dengan total penyaluran untuk pembiayaan daerah adalah 26% (tahun 2004) dan 99% (tahun 2003). Fenomena tersebut menyimpulkan bahwa penyaluran PAD terhadap perekonomian daerah masih relatif kecil di kuadran 1 dan 2, di mana fakta tersebut membuktikan adanya integrasi antara sektor penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah dengan sektor swasta. Salah satu penyebab lain atas fenomena kausalitas tersebut adalah preferensi investor terhadap lokasi (daerah) investasi di Jawa Timur. Investasi swasta merupakan *volatile*, yaitu selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat besar dan merupakan sumber penting dari berlakunya fluktuasi dalam kegiatan perekonomian.

Melalui pengertian investasi swasta tersebut, maka dapat dikembangkan sebuah pemahaman mengenai insentif investasi (*investment incentives*); yaitu investasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk merangsang investasi sektor swasta (*privat sector*), baik yang bersifat umum maupun dalam bidang tertentu (Pass dan Bryan, 1998: 332-333). Rangsangan yang diberikan pemerintah pusat/daerah dapat berupa bantuan modal untuk peralatan atau pembebasan pajak daerah dan mengusahakan infrastruktur untuk

mencari calon investor; dengan tujuan memberi area pengembangan dengan memberikan tambahan bantuan dalam mengatasi masalah pengangguran dan pembaharuan daerah perkotaan.

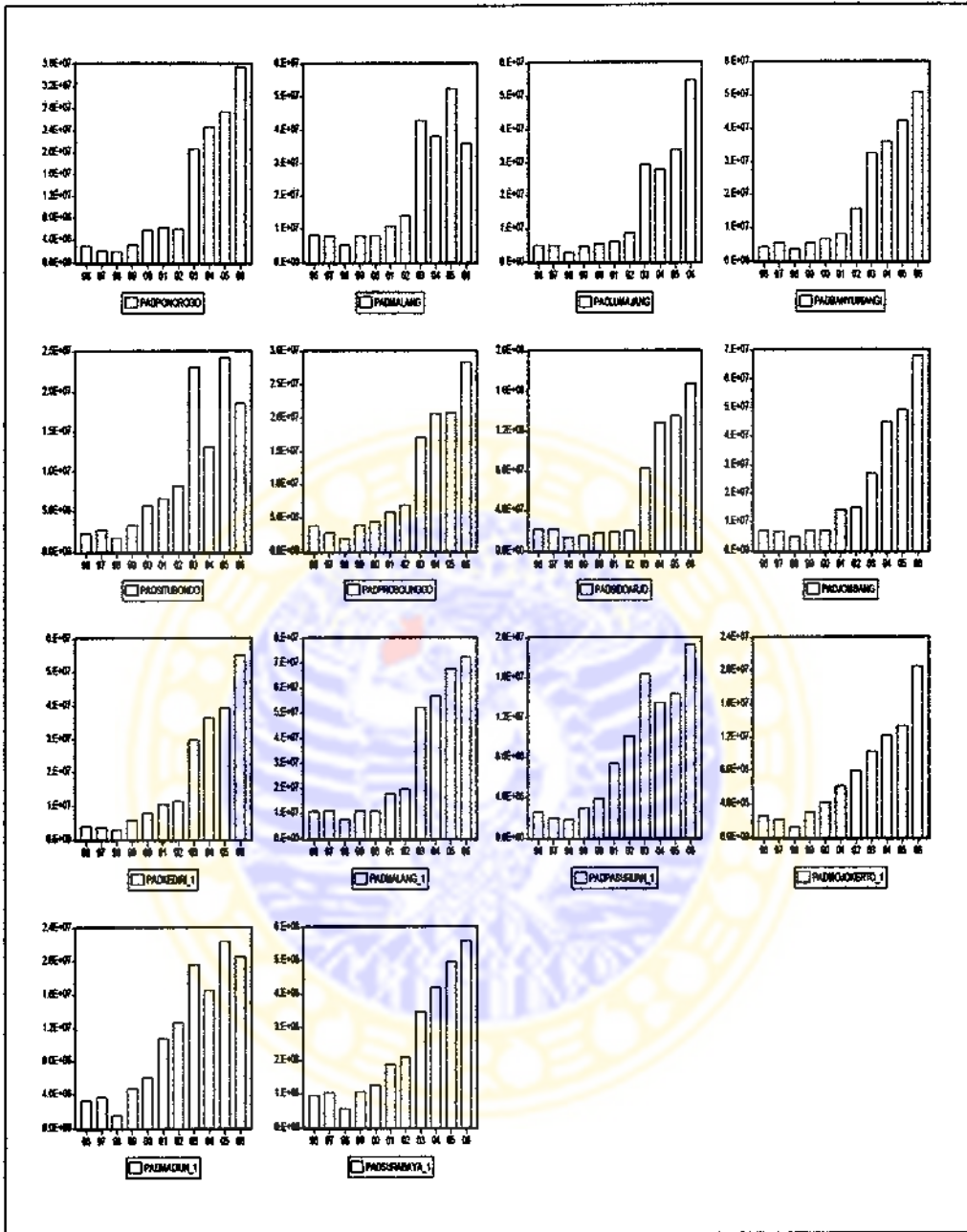
Dalam hal ini, pada kuadran 1 dan 2 terbukti berlakunya mekanisme rangsangan investasi pada periode penelitian (tahun 1996 sampai dengan 2006). Pihak swasta dalam melakukan investasi pada Kabupaten/Kota di kuadran ini hanya berpedoman pada konsep ketersediaan infrastruktur yang telah *settle* (ada dan mencukupi) dan cenderung menghiraukan apakah pemerintah berkenan memberi insentif atas investasi tersebut.

Pada kuadran 4, di mana rata-rata pertumbuhan investasi swasta lebih kecil dibandingkan rata-rata Jawa Timur terjadi fenomena hubungan satu arah antara investasi swasta dan pendapatan daerah. Pola tersebut merupakan dampak dari keterpurukan perekonomian di mana rata-rata kontribusi pendapatan daerah terhadap PDRB hanya sekitar 0,02%, sedangkan rata-rata Jawa Timur adalah 1,47% dan kontribusi Investasi Swasta Daerah Kabupaten Sumenep hanya berkisar 0,15% per tahun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kuadran 1 (Gambar 4.5, halaman 50) menunjukkan *trend* yang serupa satu sama lainnya, yaitu menurun di tahun 1998, bahkan sebagian besar mengalami *negatif growth*. Perbedaan perolehan PAD terjadi antara Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember dengan Kabupaten/Kota lainnya, di mana pada tahun 1996 sampai dengan 2006 tercatat PAD lebih besar daripada 400 milyar rupiah, sedangkan daerah lainnya hanya sekitar 100 sampai 300 milyar rupiah.

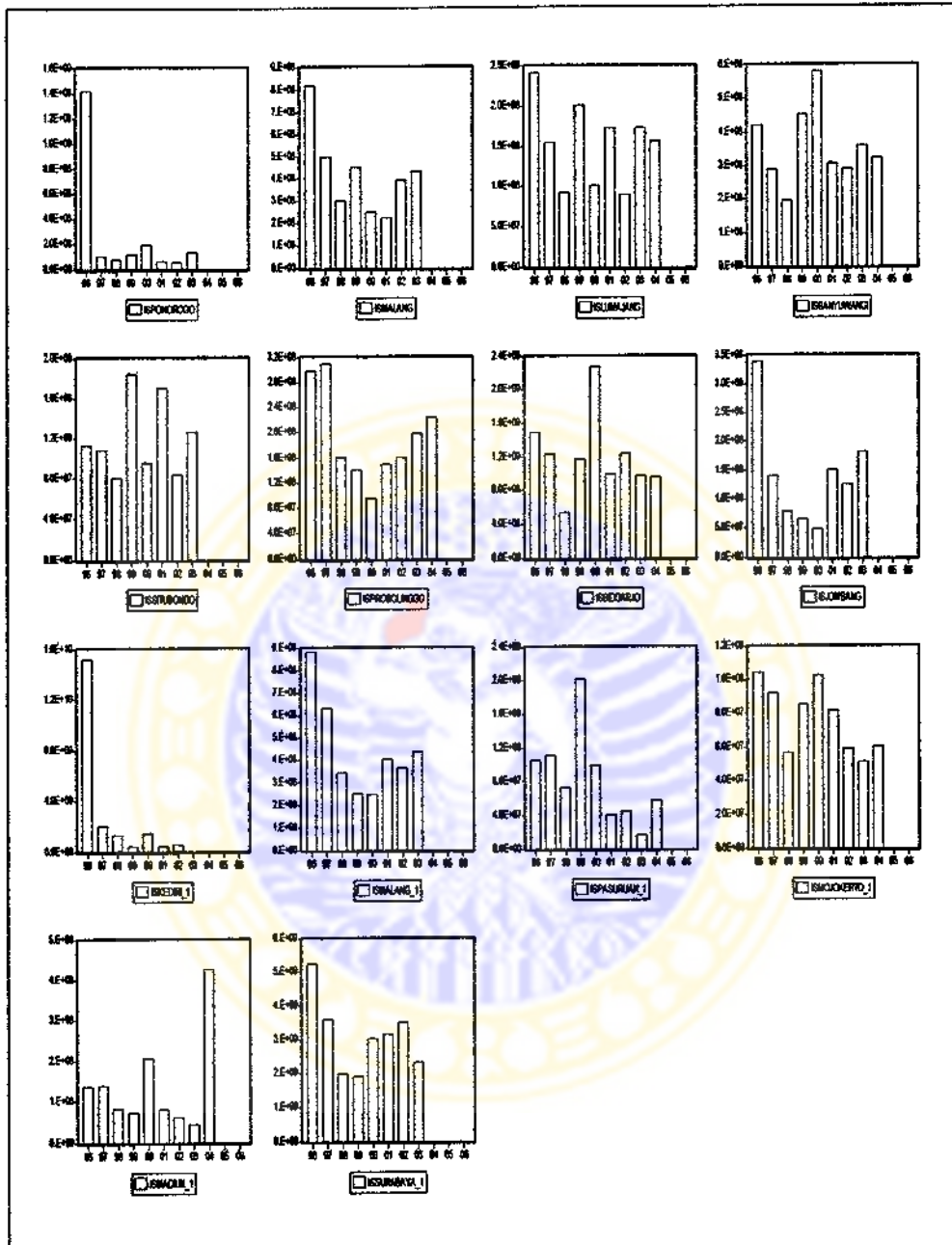
Pertumbuhan IS di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan yang paling besar di tahun 1998 (lebih dari 45%), jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di kuadran 1 pada waktu yang sama (Gambar 4.6, halaman 51). Sementara itu, tingkat pertumbuhan paling besar terdapat ditahun 1999 untuk Kabupaten Jember (lebih dari 100%). Perbedaan dengan pola PAD adalah ketidaksinambungan pola, atau dengan kata lain terjadi pola yang cenderung fluktuatif untuk variabel IS. Kisaran skala pada IS (lebih dari 100%) lebih besar daripada PAD (sekitar 30%), hal tersebut menyebabkan ketidaksinambungan pola dalam periode penelitian. Implikasinya berupa mengecilnya bias (*error*) dalam proses saling mempengaruhi antara PAD dengan IS, sehingga menimbulkan pengaruh yang signifikan antara PAD dengan IS.

Pertumbuhan PAD di kuadran 2 mengalami pola yang serupa dengan kuadran 1, yaitu cenderung menaik pada tahun 1999 sampai tahun 2000 dan menurun di tahun 1998 (Gambar 4.7, halaman 53). Pada kuadran 2, pola yang terjadi dalam satu grup cenderung seragam (homogen). PAD tertinggi dari kuadran 2 tercatat pada tahun 2006 dengan nominal 558 milyar rupiah (Kota Surabaya), sedangkan tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lumajang pada tahun 2003 (lebih dari 100%). Adapun penurunan yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Lumajang pula pada tahun 1998 (sekitar 47%).



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diolah.

Gambar 4.7
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kuadran II
Tahun 1996 Sampai Dengan 2006



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diolah.

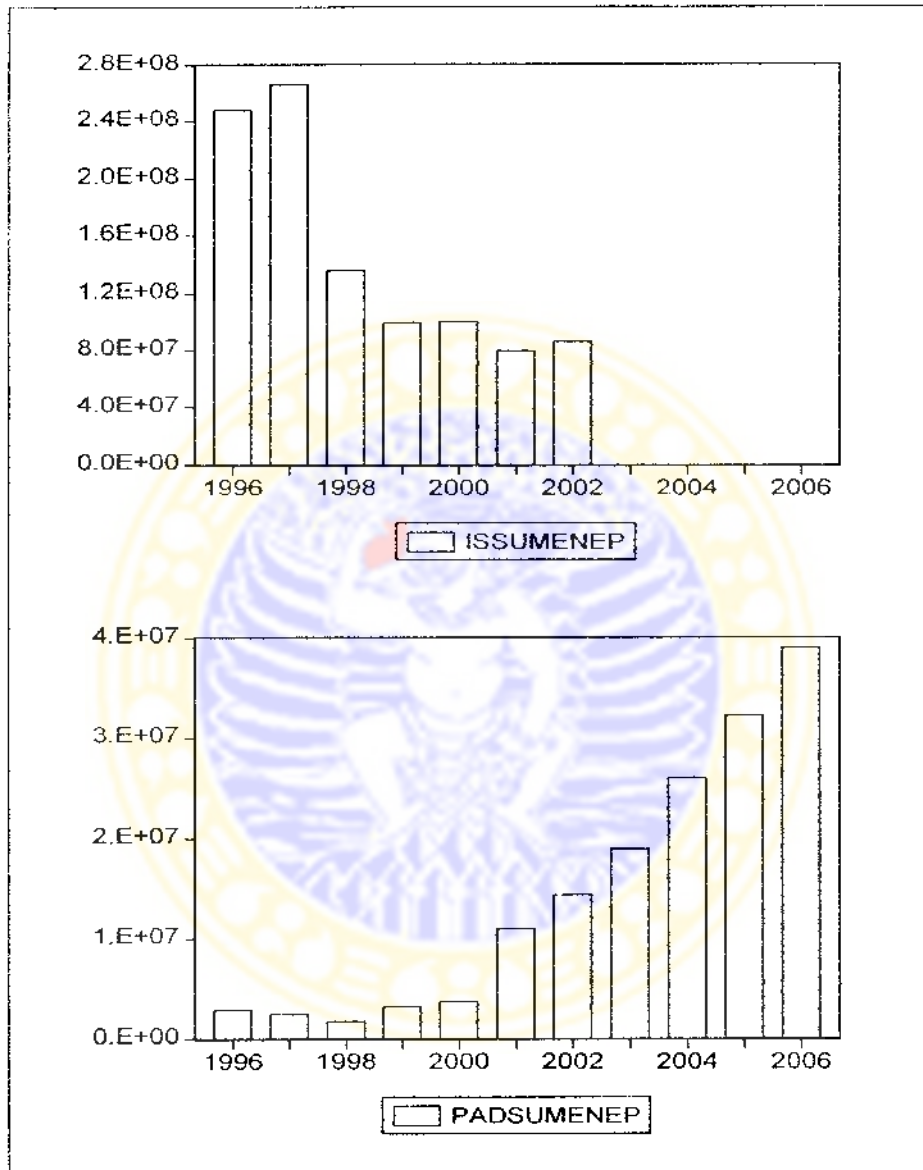
Gambar 4.8
Investasi Swasta
Kuadran II
Tahun 1996 Sampai Dengan 2006

Pada variabel IS (Gambar 4.8, halaman 54), kecenderungan pola homogen terjadi pada tahun 1996 sampai dengan 1998, namun terdapat pengecualian untuk Kota Kediri. Sebagaimana diketahui bahwa, Kota Kediri merupakan kawasan sentra industri rokok, sehingga menyebabkan fluktuasi dari kontribusi PAD terhadap PDRB yang cenderung stabil (8% selama tahun 1996 sampai dengan 2002). Stabilitas tersebut menimbulkan pengaruh terhadap kontinuitas investasi swasta di Kota Kediri.

Ketidakwajaran realisasi investasi swasta terjadi di Kota Malang, di mana pada tahun 2000 tercatat hanya sebesar 223 milyar rupiah, sedangkan daerah lain telah mencapai lebih dari 300 milyar rupiah. Pola yang menurun juga terlihat di Kota Malang pada periode 1999 sampai 2002. Homogenitas antara kedua variabel dalam kuadran 2 terindikasikan melalui pergerakan grafis yang cenderung mempunyai pola fluktuasi serupa

Kuadran 4 hanya memiliki 1 Kabupaten/Kota sebagai anggota, yaitu Kabupaten Sumenep. Serupa dengan kuadran lainnya yang menunjukkan penurunan di tahun 1998, begitu juga dengan Kabupaten Jember (Gambar 4.9, halaman 56). Variabel investasi swasta menunjukkan penurunan sebesar 48% dari periode sebelumnya dan variabel PAD menunjukkan penurunan sebesar 30% di tahun 1998. Akan tetapi, pada tahun 1999 terjadi kenaikan sekitar 12 % atas variabel IS, sedangkan variabel PAD meningkat 84%. Periode 2000 sampai tahun 2002, terjadi pola yang bersifat *reversal* (berkebalikan) antara variabel IS dengan PAD, yaitu jika IS mengalami kenaikan, maka PAD mengalami penurunan dan

begitu juga sebaliknya. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya proses satu arah antara IS terhadap PAD pada kuadran 4.



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, tahun 1996 sampai dengan 2006, diofah.

Gambar 4.9
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Investasi Swasta Kuadran IV
Tahun 1996 Sampai Dengan 2006

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan :

Simpulan penelitian adalah sebagai berikut :

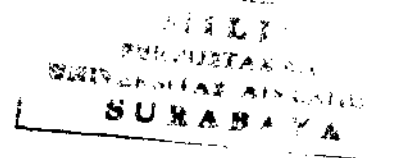
1. Pengaruh investasi swasta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan tahun 2006:
 - a. Untuk Jawa Timur: Investasi Swasta terbukti mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006
 - b. Untuk kuadran 1: Investasi Swasta terbukti mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006
 - c. Untuk kuadran 2: Investasi Swasta terbukti mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006.
 - d. Untuk kuadran 3: data klasifikasi untuk pengujian tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan estimasi.
 - e. Untuk kuadran 4: Investasi Swasta terbukti mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006.
2. Pengaruh kausalitas investasi swasta dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 1996 sampai dengan tahun 2006:

- a. Untuk Jawa Timur: Investasi Swasta terbukti mempunyai hubungan kausalitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006
 - b. Untuk kuadran 1: Investasi Swasta terbukti mempunyai hubungan kausalitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai 2006.
 - c. Untuk kuadran 2: Investasi Swasta terbukti mempunyai hubungan kausalitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006.
 - d. Untuk kuadran 3: data klasifikasi untuk pengujian tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan estimasi.
 - e. Untuk kuadran 4: Investasi Swasta terbukti tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 1996 sampai dengan 2006.
3. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa di Jawa Timur terdapat pola kausalitas antara PAD terhadap IS, namun pola tersebut ternyata tidak terjadi pada unit-unit terkecil (kuadran). Pada daerah dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta lebih tinggi dibanding dengan rata-rata Jawa Timur pola tersebut lebih disebabkan faktor *integrasi* antara sektor swasta dengan pemerintah. Pada daerah dengan rata-rata pertumbuhan investasi swasta lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan Jawa Timur, maka pola hubungan satu arah antara investasi swasta terhadap Pendapatan

Asli Daerah lebih disebabkan faktor rendahnya kontribusi penerimaan maupun pengeluaran daerah terhadap perekonomian (PDRB)

5.2. Saran :

1. Secara empiris, PAD terbukti mempunyai *bidirectional relationship* (dua arah) dengan Investasi Swasta. Hasil tersebut mengimplikasikan adanya proses *stimuli* (rangsangan) yang terkait langsung dari sektor penerimaan daerah terhadap perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memikirkan langkah-langkah pengembangan penerimaan daerah melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan Pemerintah Daerah.
2. Menurut hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pada daerah-daerah yang bertetangga terdapat kecenderungan untuk berpola serupa (homogen). Hal tersebut menimbulkan implikasi mengenai perlunya pengembangan kutub-kutub pertumbuhan yang baru di Jawa Timur, tujuannya adalah terjadinya pemerataan proses ekonomi secara regional.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Badan Pusat Statistik (BPS), Surabaya, Jawa Timur, tahun 1996.

....., tahun 1998.

....., tahun 1999.

....., tahun 2000.

....., tahun 2001.

....., tahun 2002.

....., tahun 2004.

....., tahun 2005.

....., tahun 2006.

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (BAPEPROV), tahun 2004.

Chamberlain, Gary, 1983, Panel Data, Chapter 22 in *The Handbook of Econometrics Vol II*, Z. Griliches and M. Intrilligator (ed), Amsterdam: North Holland Publishing Co.

Djamin, Zulkarnain, 1984, *Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama*, Jakarta, LP FE UI.

Djojohadikusumo, Sumitro, 1991, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Eakin-Holtz, D.; W. Newey and H. Rosen, 1985, "Implementing Causality Test with Panel Data, With an Example from Local Public Finance", www.bi.go.id, 23 Agustus 2007.

Filer, D, 1999, *Estimating Vector Autoregressions with Panel Data*, *Econometrica* 56, 1371-1395.

Friedman, Milton dan Ana J. Schwartz, 1963, *A Monetary History of the United States: 1867-1960*, Princeton University Press.

- Gujarati, Damodar, N. *Basic Econometrics*, Mc Graw-Hill.
- Kaho, Josef Riwu, 2003, *Prospek Ekonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)* edisi pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Krugman, Paul, 1996, *Are Currency Crises Self Fulfilling?*, NBER Macroeconomic Annual, Vol. 2. 146-158
- Mangkusubroto, Guritno, 1993. *Ekonomi Publik*, Jogjakarta, BPFE.
- Muhammad, Mar'ie, 1989, *Peraturan Perpajakan*, www.pajak.go.id, 14 Juli 2007.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B Musgrave, 1991, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, terjemahan, Jakarta, Gramedia.
- Nicholson, Walter. 2002. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, 1998, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Kedua, terjemahan, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Sekretariat Jenderal BPK, 1998, *Keuangan Negara dan BPK*, Jakarta.
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE.
- Sukirno, Sadono, 2004, *Makroekonomi : Teori Pengantar*, edisi ketiga, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsi, Ibnu, 1994, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Thomas, R.L.1997. *Modern Econometrics (an Introduction)*, Addison-Wesley.
- Todaro, Michael, 1998, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, terjemahan, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Winardi, 1998, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju.

LAMPIRAN 1 – PAD JATIM

Dependent Variable: PAD?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:30

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 37

Total panel (balanced) observations: 333

Convergence achieved after 7 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1546071.	386689.2	3.998225	0.0001
PAD?(-1)	0.742640	0.077830	9.541830	0.0000
PAD?(-2)	0.505407	0.088933	5.682994	0.0000
IS?(-1)	0.001638	0.001777	0.921519	0.3575
IS?(-2)	-0.000419	0.000199	-2.109957	0.0356

Weighted Statistics

R-squared	0.844531	Mean dependent var	54968735
Adjusted R-squared	0.842635	S.D. dependent var	61636633
S.E. of regression	24450821	Sum squared resid	1.96E+17
F-statistic	445.4351	Durbin-Watson stat	2.108132
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.823091	Mean dependent var	29979683
Adjusted R-squared	0.820934	S.D. dependent var	57781317
S.E. of regression	24450878	Sum squared resid	1.96E+17
Durbin-Watson stat	2.239149		

LAMPIRAN 2 – IS JATIM

Dependent Variable: IS?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:33

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 37

Total panel (balanced) observations: 333

Convergence achieved after 10 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35629973	5560028.	6.408236	0.0000
PAD?(-1)	-0.210380	0.060150	-3.497575	0.0005
PAD?(-2)	-1.185378	0.123919	-9.565739	0.0000
IS?(-1)	0.504527	0.054590	9.242082	0.0000
IS?(-2)	0.050085	0.031456	1.592210	0.1123

Weighted Statistics

R-squared	0.285091	Mean dependent var	3.91E+08
Adjusted R-squared	0.276373	S.D. dependent var	3.34E+08
S.E. of regression	2.84E+08	Sum squared resid	2.64E+19
F-statistic	32.69994	Durbin-Watson stat	2.290471
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.572464	Mean dependent var	2.11E+08
Adjusted R-squared	0.567250	S.D. dependent var	4.32E+08
S.E. of regression	2.84E+08	Sum squared resid	2.64E+19
Durbin-Watson stat	1.521350		

LAMPIRAN 3 – IS Q1

Dependent Variable: PAD?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:34

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 22

Total panel (balanced) observations: 198

Convergence achieved after 7 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4414336	733987.6	6.014184	0.0000
IS?(-1)	-0.009940	0.002035	-4.885033	0.0000
IS?(-2)	0.013052	0.002738	4.767826	0.0000
PAD?(-1)	0.479391	0.085431	5.611444	0.0000
PAD?(-2)	0.545302	0.096675	5.640571	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.531012	Mean dependent var	36860257
Adjusted R-squared	0.521292	S.D. dependent var	40195452
S.E. of regression	27810720	Sum squared resid	1.49E+17
F-statistic	54.63110	Durbin-Watson stat	2.164779
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.215210	Mean dependent var	24063915
Adjusted R-squared	0.198945	S.D. dependent var	31072899
S.E. of regression	27810771	Sum squared resid	1.49E+17
Durbin-Watson stat	2.188477		

LAMPIRAN 4 – PAD Q1

Dependent Variable: PAD?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:34

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 22

Total panel (balanced) observations: 198

Convergence achieved after 7 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4414336	733987.6	6.014184	0.0000
IS?(-1)	-0.009940	0.002035	-4.885033	0.0000
IS?(-2)	0.013052	0.002738	4.767826	0.0000
PAD?(-1)	0.479391	0.085431	5.611444	0.0000
PAD?(-2)	0.545302	0.096675	5.640571	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.531012	Mean dependent var	36860257
Adjusted R-squared	0.521292	S.D. dependent var	40195452
S.E. of regression	27810720	Sum squared resid	1.49E+17
F-statistic	54.63110	Durbin-Watson stat	2.164779
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.215210	Mean dependent var	24063915
Adjusted R-squared	0.198945	S.D. dependent var	31072899
S.E. of regression	27810771	Sum squared resid	1.49E+17
Durbin-Watson stat	2.188477		

LAMPIRAN 5 – PAD Q2

Dependent Variable: PAD?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:39

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 14

Total panel (balanced) observations: 126

Convergence achieved after 5 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	730046.6	682629.7	1.069462	0.2870
IS?(-1)	0.003138	0.003279	0.956980	0.3405
IS?(-2)	-0.000605	0.000375	-1.611050	0.1098
PAD?(-1)	0.901033	0.086566	10.40866	0.0000
PAD?(-2)	0.353381	0.119459	2.958182	0.0037

Weighted Statistics

R-squared	0.883699	Mean dependent var	52281931
Adjusted R-squared	0.879855	S.D. dependent var	43015919
S.E. of regression	14910165	Sum squared resid	2.69E+16
F-statistic	229.8519	Durbin-Watson stat	2.052055
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.969945	Mean dependent var	40226214
Adjusted R-squared	0.968952	S.D. dependent var	84618584
S.E. of regression	14910193	Sum squared resid	2.69E+16
Durbin-Watson stat	1.780253		

LAMPIRAN 6 – IS Q2

Dependent Variable: IS?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:40

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 14

Total panel (balanced) observations: 126

Convergence achieved after 12 iterations

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	36415292	10876465	3.348082	0.0011
IS?(-1)	0.591116	0.089449	6.608393	0.0000
IS?(-2)	0.016250	0.012674	1.282118	0.2023
PAD?(-1)	-2.674283	0.672912	-3.974197	0.0001
PAD?(-2)	1.345403	0.893836	1.505200	0.1349

Weighted Statistics

R-squared	0.264119	Mean dependent var	5.55E+08
Adjusted R-squared	0.239792	S.D. dependent var	4.60E+08
S.E. of regression	4.01E+08	Sum squared resid	1.95E+19
F-statistic	10.85719	Durbin-Watson stat	2.477938
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.610256	Mean dependent var	3.24E+08
Adjusted R-squared	0.597372	S.D. dependent var	6.33E+08
S.E. of regression	4.01E+08	Sum squared resid	1.95E+19
Durbin-Watson stat	1.470185		

LAMPIRAN 7 – PAD Q4

Dependent Variable: PAD?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:42

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 1

Total panel (balanced) observations: 9

Convergence achieved after 1 iteration

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9213285.	5968869.	1.543556	0.1976
IS?(-1)	-0.019418	0.009248	-2.099724	0.1037
IS?(-2)	-0.020972	0.020602	-1.017961	0.3663
PAD?(-1)	0.612116	0.468869	1.305515	0.2617
PAD?(-2)	0.401965	0.364204	1.103680	0.3317

Weighted Statistics

R-squared	0.987576	Mean dependent var	16675150
Adjusted R-squared	0.975151	S.D. dependent var	13435721
S.E. of regression	2117948.	Sum squared resid	1.79E+13
Log likelihood	-140.2149	F-statistic	79.48621
Durbin-Watson stat	2.751104	Prob(F-statistic)	0.000459

Unweighted Statistics

R-squared	0.987576	Mean dependent var	16675150
Adjusted R-squared	0.975151	S.D. dependent var	13435721
S.E. of regression	2117948.	Sum squared resid	1.79E+13
Durbin-Watson stat	2.751104		

LAMPIRAN 8 IS – Q4

Dependent Variable: IS?

Method: GLS (Cross Section Weights)

Date: 01/02/00 Time: 00:45

Sample: 1998 2006

Included observations: 9

Number of cross-sections used: 1
 Total panel (balanced) observations: 9
 Convergence achieved after 1 iteration

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40014980	37061087	1.079703	0.3410
IS?(-1)	0.298798	0.151207	1.976079	0.1193
IS?(-2)	0.098099	0.195733	0.501188	0.6426
PAD?(-1)	2.400371	2.930875	0.818994	0.4588
PAD?(-2)	-5.458269	3.273071	-1.667629	0.1707

Weighted Statistics

R-squared	0.849848	Mean dependent var	55731124
Adjusted R-squared	0.699697	S.D. dependent var	55078214
S.E. of regression	30182829	Sum squared resid	3.64E+15
Log likelihood	-164.1263	F-statistic	5.659932
Durbin-Watson stat	1.460893	Prob(F-statistic)	0.060866

Unweighted Statistics

R-squared	0.849848	Mean dependent var	55731124
Adjusted R-squared	0.699697	S.D. dependent var	55078214
S.E. of regression	30182829	Sum squared resid	3.64E+15
Durbin-Watson stat	1.460893		

LAMPIRAN 9 PAD – Q4

Dependent Variable: PAD?
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 01/02/00 Time: 00:42
 Sample: 1998 2006

Included observations: 9
 Number of cross-sections used: 1
 Total panel (balanced) observations: 9
 Convergence achieved after 1 iteration

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9213285.	5968869.	1.543556	0.1976
IS?(-1)	-0.019418	0.009248	-2.099724	0.1037
IS?(-2)	-0.020972	0.020602	-1.017961	0.3663
PAD?(-1)	0.612116	0.468869	1.305515	0.2617
PAD?(-2)	0.401965	0.364204	1.103680	0.3317

Weighted Statistics

R-squared	0.987576	Mean dependent var	16675150
Adjusted R-squared	0.975151	S.D. dependent var	13435721
S.E. of regression	2117948.	Sum squared resid	1.79E+13
Log likelihood	-140.2149	F-statistic	79.48621
Durbin-Watson stat	2.751104	Prob(F-statistic)	0.000459

Unweighted Statistics

R-squared	0.987576	Mean dependent var	16675150
Adjusted R-squared	0.975151	S.D. dependent var	13435721
S.E. of regression	2117948.	Sum squared resid	1.79E+13
Durbin-Watson stat	2.751104		

ADN Perpustakaan Universitas Airlangga

**TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN INVESTASI SWASTA (IS)
DI JAWA TIMUR 1996-2006 (000 RUPIAH)**

No	Daerah		IS	PAD
1	pacitan	1996	84.252.175	1.141.417
		1997	60.836.832	1.655.227
		1998	51.796.730	1.833.952
		1999	56.303.129	2.261.366
		2000	70.124.970	2.983.695
		2001	50.756.900	3.089.122
		2002	452.726.565	5.635.504
		2003	56.106.130	12.543.787
		2004	-	13.719.781
		2005	-	12.014.000
2	ponorogo	1996	1.419.792.366	2.940.726
		1997	100.527.933	2.131.564
		1998	71.092.609	1.980.471
		1999	119.882.364	3.343.479
		2000	191.888.869	5.833.338
		2001	60.397.393	6.262.406
		2002	50.041.664	6.037.823
		2003	127.615.438	20.574.931
		2004	-	24.561.223
		2005	-	27.279.000
3	trenggalek	1996	85.651.766	1.160.403
		1997	82.365.418	1.648.223
		1998	43.260.578	1.888.799
		1999	100.929.054	3.554.080
		2000	80.496.337	5.112.441
		2001	20.871.176	6.696.127
		2002	18.698.947	6.056.706
		2003	57.997.136	1.790.246
		2004	67.857.471	17.691.444
		2005	-	19.981.000
4	tulungagung	1996	379.232.033	2.659.016
		1997	369.028.013	3.681.565
		1998	212.280.433	2.050.680
		1999	300.019.845	5.455.466
		2000	400.485.901	8.806.190
		2001	168.684.436	9.928.864
		2002	230.852.887	10.626.183
		2003	15.968.144	30.822.620
		2004	110.520.449	30.035.794
		2005	-	30.791.000
5	blitar	1996	220.474.230	3.178.677
		1997	84.218.228	3.368.619
		1998	55.818.844	2.179.472

		1999	250.882.190	4.306.623
		2000	101.814.388	6.089.155
		2001	45.479.010	8.392.878
		2002	145.734.044	10.913.737
		2003	158.115.451	14.643.266
		2004	145.649.561	25.357.378
		2005	-	27.867.000
		2006	-	112.336.000
6	kediri	1996	325.440.302	5.226.120
		1997	313.122.956	6.271.624
		1998	182.123.270	3.861.458
		1999	180.538.644	5.691.129
		2000	100.115.754	6.866.881
		2001	214.327.233	7.532.079
		2002	210.018.919	12.592.241
		2003	266.289.640	29.551.009
		2004	243.894.469	34.167.787
		2005	-	23.491.000
		2006	-	53.483.000
7	malang	1996	817.856.564	8.222.972
		1997	498.569.197	7.795.462
		1998	300.379.344	5.272.771
		1999	450.037.319	7.711.607
		2000	250.381.805	7.769.000
		2001	223.339.461	10.701.087
		2002	393.255.171	14.069.212
		2003	433.420.387	42.962.972
		2004	-	37.986.596
		2005	-	52.450.000
		2006	-	36.052.000
8	lumajang	1996	240.056.571	4.950.241
		1997	155.126.965	5.009.853
		1998	91.968.774	2.800.325
		1999	200.480.646	4.653.401
		2000	101.424.792	5.337.897
		2001	173.248.245	5.875.622
		2002	90.207.530	8.512.506
		2003	172.611.372	29.350.115
		2004	157.879.168	27.733.733
		2005	-	33.942.000
		2006	-	54.798.000
9	jember	1996	471.699.106	8.946.018
		1997	153.886.457	11.591.470
		1998	88.670.721	6.043.985
		1999	400.057.028	10.098.130
		2000	200.917.277	13.225.356
		2001	368.614.881	12.735.200
		2002	150.159.701	13.105.210
		2003	332.570.352	40.612.033
		2004	278.127.385	41.329.341

		2005	-	51.472.000
		2006	-	231.150.000
10	banyuwangi	1996	420.479.525	4.172.023
		1997	287.963.514	5.453.344
		1998	195.347.422	3.676.683
		1999	453.197.970	5.507.490
		2000	580.265.747	6.441.084
		2001	306.860.489	8.043.905
		2002	289.799.324	15.422.593
		2003	360.426.637	32.556.270
		2004	323.811.459	35.974.750
		2005	-	42.420.000
		2006	-	50.811.000
11	bondowoso	1996	157.806.111	2.650.065
		1997	107.102.047	2.398.087
		1998	86.437.441	1.739.806
		1999	300.507.272	2.077.526
		2000	120.322.710	4.206.936
		2001	135.353.538	5.887.619
		2002	32.140.542	6.622.452
		2003	76.089.764	22.144.950
		2004	638.226.560	18.321.523
		2005	-	20.118.000
		2006	-	37.023.000
12	situbondo	1996	113.032.518	2.219.584
		1997	108.198.625	2.739.484
		1998	80.465.052	1.740.864
		1999	183.473.598	3.278.616
		2000	94.747.253	5.747.040
		2001	170.570.420	6.573.760
		2002	83.706.230	8.289.295
		2003	125.895.841	22.990.049
		2004	-	13.150.574
		2005	-	24.149.000
		2006	-	18.487.000
13	probolinggo	1996	298.071.462	3.738.752
		1997	309.024.517	2.761.949
		1998	160.627.503	1.944.739
		1999	140.372.017	3.921.477
		2000	96.232.562	4.444.741
		2001	149.753.279	5.805.349
		2002	160.090.170	6.832.203
		2003	198.302.624	16.993.276
		2004	224.226.696	20.630.354
		2005	-	20.820.000
		2006	-	28.283.000
14	pasuruan	1996	1.069.288.866	6.634.220
		1997	776.996.726	7.563.459
		1998	441.702.470	5.423.444
		1999	750.665.275	6.157.437
	Skrpsi	Ana Pengaruh Investasi Swa	Herwindo Sangga	

		2000	1.662.700.606	7.779.845
		2001	620.691.105	8.678.377
		2002	700.619.693	10.459.171
		2003	393.443.445	54.544.404
		2004	449.552.382	61.382.828
		2005	-	64.640.000
		2006	-	61.494.000
15	sidoarjo	1996	1.495.466.204	21.866.100
		1997	1.233.602.182	21.533.230
		1998	532.461.182	13.533.295
		1999	1.178.197.347	15.068.356
		2000	2.276.763.595	17.795.544
		2001	996.945.999	18.996.797
		2002	1.233.991.472	20.738.557
		2003	969.777.808	82.326.288
		2004	963.069.671	128.834.741
		2005	-	135.280.000
		2006	-	167.961.000
16	mojokerto	1996	251.784.872	4.227.744
		1997	132.672.631	5.774.518
		1998	81.152.857	3.177.190
		1999	241.153.589	5.878.998
		2000	150.863.711	6.569.287
		2001	152.808.818	10.301.174
		2002	162.710.476	12.961.484
		2003	188.712.107	44.158.846
		2004	206.437.099	34.058.206
		2005	-	38.064.000
		2006	-	62.454.000
17	jombang	1996	339.385.455	6.928.903
		1997	140.078.476	6.613.082
		1998	80.078.872	4.814.462
		1999	65.054.036	7.045.304
		2000	48.837.709	7.117.386
		2001	151.309.665	13.940.450
		2002	126.269.417	15.097.702
		2003	182.653.926	26.699.759
		2004	-	44.889.058
		2005	-	48.990.000
		2006	-	67.999.000
18	nganjuk	1996	232.760.307	4.256.356
		1997	106.681.690	4.385.491
		1998	62.435.072	2.759.033
		1999	51.073.999	5.797.913
		2000	45.994.589	6.727.412
		2001	67.698.490	8.251.799
		2002	125.971.370	10.438.882
		2003	122.755.918	76.960.805
		2004	149.006.583	35.175.573
		2005	-	40.295.000

		2006	-	109.026.000
19	madiun	1996	132.259.686	2.254.517
		1997	104.856.691	2.063.362
		1998	57.941.253	1.447.848
		1999	168.539.250	3.047.988
		2000	130.304.126	50.812.374
		2001	91.323.479	6.415.604
		2002	64.829.989	10.428.569
		2003	95.005.759	20.588.253
		2004	98.816.462	19.326.056
		2005	-	15.713.000
		2006	-	31.694.000
20	magetan	1996	95.783.441	2.219.812
		1997	93.460.982	2.910.467
		1998	64.140.534	1.690.434
		1999	170.628.486	3.093.553
		2000	94.024.202	3.264.538
		2001	78.097.099	4.741.741
		2002	74.382.805	5.036.895
		2003	101.838.885	18.209.075
		2004	100.041.314	24.110.810
		2005	-	23.384.000
		2006	-	67.413.000
21	ngawi	1996	142.181.586	2.056.285
		1997	104.439.769	2.691.578
		1998	74.129.094	1.007.251
		1999	60.655.036	3.779.065
		2000	110.024.223	5.891.587
		2001	131.437.765	6.540.182
		2002	95.285.115	7.175.452
		2003	133.744.163	27.252.986
		2004	102.411.334	18.049.644
		2005	-	13.408.000
		2006	-	30.353.000
22	bojonegoro	1996	146.356.427	2.572.249
		1997	167.995.225	4.703.642
		1998	97.917.767	24.377.760
		1999	83.880.901	3.302.901
		2000	87.287.096	4.393.800
		2001	81.260.497	4.866.225
		2002	103.009.903	6.890.901
		2003	156.833.878	26.517.131
		2004	-	33.000.009
		2005	-	40.166.000
		2006	-	39.087.000
23	tuban	1996	374.463.831	4.225.401
		1997	143.146.620	5.969.637
		1998	132.865.357	4.776.021
	Skripsi	1999	200.166.748	5.546.922
		2000	390.506.417	6.380.520

		2001	417.545.528	7.454.854
		2002	295.761.906	16.139.439
		2003	257.718.683	54.127.564
		2004	262.511.416	59.558.173
		2005	-	61.486.000
		2006	-	84.623.000
24	lamongan	1996	144.937.374	3.619.828
		1997	104.348.149	3.539.884
		1998	85.694.354	2.175.856
		1999	213.036.272	6.084.527
		2000	130.747.100	7.983.735
		2001	168.998.009	105.257.967
		2002	144.271.395	15.453.446
		2003	140.544.398	26.677.669
		2004	167.532.388	34.610.173
		2005	-	40.063.000
		2006	-	42.442.000
25	gresik	1996	1.220.917.522	11.894.094
		1997	798.743.964	10.982.615
		1998	527.544.448	6.430.003
		1999	1.203.334.381	101.258.707
		2000	661.147.982	13.393.837
		2001	903.409.247	12.464.795
		2002	703.813.813	15.384.022
		2003	624.479.748	51.673.702
		2004	-	77.105.318
		2005	-	47.961.000
		2006	-	101.603.000
26	bangkalan	1996	72.022.634	2.580.125
		1997	76.818.569	2.069.698
		1998	740.112.819	1.685.900
		1999	198.371.824	3.813.710
		2000	99.220.486	5.037.689
		2001	60.012.953	7.976.420
		2002	79.531.264	10.181.069
		2003	60.145.370	40.120.079
		2004	121.616.998	20.569.300
		2005	-	72.389.000
		2006	-	28.762.000
27	sampang	1996	120.855.065	1.556.111
		1997	6.914.078	1.893.516
		1998	63.378.931	969.558
		1999	49.324.513	1.629.755
		2000	100.382.557	3.131.342
		2001	88.793.831	5.463.520
		2002	67.562.645	9.051.756
		2003	41.674.827	12.223.558
		2004	-	15.811.139
Shripsi		2005	-	59.710.000
		2006	-	19.627.000

28	pamekasan	1996	89.374.657	2.361.520
		1997	80.677.274	3.173.727
		1998	46.030.049	1.435.905
		1999	101.326.244	3.235.139
		2000	170.492.636	6.401.849
		2001	70.057.660	79.630.039
		2002	48.503.862	11.673.405
		2003	81.908.548	15.249.145
		2004	49.049.261	16.186.954
		2005	-	22.627.000
29	sumenep	1996	247.929.209	2.953.351
		1997	265.730.010	2.423.622
		1998	136.108.679	1.690.457
		1999	99.421.977	3.122.625
		2000	100.167.848	3.731.549
		2001	79.759.097	10.956.631
		2002	86.122.515	14.431.415
		2003	-	18.995.064
		2004	-	25.949.608
		2005	-	32.208.000
30	kediri*	1996	15.191.218.944	3.966.608
		1997	2.022.018.516	3.479.425
		1998	1.311.938.910	2.735.359
		1999	409.482.246	5.694.884
		2000	1.486.342.114	7.814.903
		2001	358.887.796	10.542.419
		2002	550.690.378	11.246.977
		2003	-	29.524.849
		2004	-	36.292.105
		2005	-	39.184.000
31	blitar*	1996	63.301.178	2.553.591
		1997	57.721.768	2.044.792
		1998	34.836.104	1.877.744
		1999	85.216.720	3.069.026
		2000	30.193.098	4.076.704
		2001	62.074.246	5.801.696
		2002	33.178.476	11.750.291
		2003	12.376.895	30.511.730
		2004	24.363.085	23.250.735
		2005	-	26.402.000
32	malang*	1996	883.696.672	10.637.579
		1997	631.312.033	11.220.575
		1998	346.375.197	7.720.787
		1999	251.138.729	10.991.832
		2000	250.487.342	10.937.230
		2001	403.179.484	17.987.052

		2002	366.218.001	19.733.294
		2003	434.104.412	52.292.973
		2004	-	56.870.040
		2005	-	67.837.000
		2006	-	72.377.000
33	probolinggo*	1996	193.779.179	2.127.906
		1997	99.461.599	2.358.107
		1998	86.574.068	1.952.406
		1999	130.124.126	3.050.074
		2000	76.696.137	42.407.634
		2001	640.214.047	8.952.970
		2002	91.260.070	10.504.677
		2003	98.647.979	17.770.046
		2004	-	19.176.127
		2005	-	21.369.000
		2006	-	31.623.000
34	pasuruan*	1996	105.719.170	2.609.271
		1997	111.082.881	2.006.127
		1998	72.269.468	1.809.723
		1999	202.256.023	2.926.847
		2000	99.740.204	3.978.521
		2001	41.207.746	7.419.420
		2002	44.778.640	10.139.239
		2003	16.175.541	16.382.177
		2004	57.720.926	13.502.334
		2005	-	14.353.000
		2006	-	19.372.000
35	mojokerto*	1996	104.588.729	2.588.282
		1997	92.365.031	2.215.521
		1998	56.735.383	1.204.353
		1999	85.199.290	3.063.684
		2000	102.583.683	4.223.928
		2001	81.822.253	6.066.183
		2002	59.182.332	7.878.920
		2003	51.432.344	10.270.046
		2004	60.121.573	12.195.951
		2005	-	13.294.000
		2006	-	20.580.000
36	madiun*	1996	136.935.906	3.216.022
		1997	138.788.156	3.681.967
		1998	84.004.014	1.474.125
		1999	72.438.316	4.758.409
		2000	206.171.431	5.950.872
		2001	81.562.091	10.691.139
		2002	60.410.205	12.554.109
		2003	43.409.694	19.571.798
		2004	426.548.417	16.517.896
		2005	-	22.360.000
		2006	-	20.540.000
37	surabaya*	1996	5.250.864.487	93.382.985

		1997	3.602.090.224	101.573.462
		1998	1.973.927.083	53.125.386
		1999	1.889.464.378	104.518.729
		2000	3.006.285.052	125.786.212
		2001	3.145.024.704	188.238.135
		2002	3.504.238.657	207.863.171
		2003	2.326.649.614	347.754.014
		2004	-	417.358.638
		2005	-	496.191.000
		2006	-	558.370.000

Keterangan : * = Kota

Sumber : Statistik Keuangan Pemerintah Daerah TK II (Kab/Kota) Propinsi Jawa Timur, diolah.

